DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Pembangunan infrastruktur dan penataan ruang memiliki peran penting dalam mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, serta berkelanjutan. Namun demikian, orientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek dapat memicu pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup.

Menanggapi tantangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara berkomitmen melakukan langkah pencegahan sekaligus penanganan melalui penguatan arah kebijakan pembangunan. Komitmen ini diwujudkan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan yang memuat visi, strategi, dan program kerja secara terpadu. Penyusunan Renstra ini ditujukan untuk menjawab berbagai isu strategis, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan yang berkelanjutan, serta pengelolaan ruang yang adil dan berwawasan lingkungan.

Sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, serta kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang, serta memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Penajam, 18 September 2025

Plt. Kepala Dinas

Muhajir, SE, S.Kom, ME, M. Ling

NIP. 198301052009041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**
DAFTAR TABEL **5**
DAFTAR GAMBAR **6**
BAB I PENDAHULUAN **7**
1.1. Latar Belakang 7
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 9
1.3. Maksud dan Tujuan 13
1.4. Sistematika Penulisan 13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **16**
2.1. Gambaran Layanan Daerah 16
2.1.a. Tugas, Fungsi, dan Struktur DPUPR 16
2.1.b. Sumber Daya DPUPR 28
2.1.c. Kinerja Pelayanan DPUPR 35
2.1.d. Kelompok Sasaran Layanan DPUPR 40
2.1.e. Mitra DPUPR dalam Pemberian Layanan 42
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis DPUPR 43
2.2.a. Permasalahan 43
2.2.b. Isu Strategis 45
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **63**
3.1 Tujuan Renstra DPUPR 63
3.1. Sasaran Renstra DPUPR 64
3.2. Strategi Renstra DPUPR 68
3.3. Arah Kebijakan DPUPR 68
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **72**
4.1. Uraian Program Renstra DPUPR 74
4.2. Uraian Kegiatan Renstra DPUPR 75
4.3. Uraian SubKegiatan Renstra DPUPR 76
4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPR 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR 136

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 138

BAB V PENUTUP 140

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 61

Tabel 3. 1 Rumusan Awal Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2029 63

Tabel 3. 2 Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja..... 64

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 67

Tabel 3. 4 Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 68

Tabel 3. 5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 69

Tabel 4. 1 Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 75

Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 77

Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 101

Tabel 4. 4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 135

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 137

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perbedaan Substansi Penyusunan Renstra PD Berdasarkan Peraturan 8

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara 27

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 73

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025, Kabupaten Penajam Paser Utara yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2024, diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Salah satu dokumen yang disusun adalah Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.

Renstra Perangkat Daerah memiliki fungsi strategis dalam siklus perencanaan pembangunan, yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) perangkat daerah, sebagai alat evaluasi kinerja berdasarkan capaian *output* dan *outcome*, serta sebagai dokumen yang adaptif namun tetap mengacu pada arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan Renstra ini juga bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah selama masa transisi pemerintahan.

Dari sisi landasan hukum dan keterpaduan kebijakan, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun sebagai panduan operasional dalam menjalankan urusan pemerintahan yang bersifat prioritas maupun pendukung. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.

Dibandingkan dengan periode sebelumnya, substansi dalam penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah mengalami sejumlah perubahan. Penyusunan Renstra Tahun 2025–2029 kini mengacu pada ketentuan terbaru sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam

Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025. Peraturan ini membawa penyesuaian terhadap struktur dan isi dokumen Renstra agar lebih relevan dengan dinamika pembangunan serta arah kebijakan nasional dan daerah. Adapun perbedaan substansi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dibandingkan dengan ketentuan pada peraturan sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1. 1
Perbedaan Substansi Penyusunan Renstra PD Berdasarkan Peraturan

PERMENDAGRI NO. 86/2017	INSTRUKSI DAGRI NO. 52/2022	INMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2025
BAB I PENDAHULUAN	**BAB I PENDAHULUAN**	**BAB I PENDAHULUAN**
1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud dan Tujuan 4. Sistematika Penulisan	1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum Penyusunan 3. Maksud dan Tujuan 4. Sistematika Penulisan	1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum Penyusunan 3. Maksud dan Tujuan 4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**	**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Perangkat Daerah 3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Perangkat Daerah 3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 4. Kelompok Sasaran Layanan	1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Perangkat Daerah 3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 4. Kelompok Sasaran Layanan 5. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 6. Isu Strategis
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**	**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Telaahan RTRW dan KLHS 4. Penentuan Isu-isu Strategis	1. Permasalahan pelayanan PD 2. Isu Strategis	1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Prov/Kab/Kota Tahun 2025-2029 2. Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025/2029
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**	**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD 2. Cascading Kinerja PD	1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Targer, dan Pagu Indikatif 2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui IKU 3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perda melalui IKK
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**	**BAB V PENUTUP**
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**	
BAB VIII PENUTUP	**BAB VIII PENUTUP**	

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, diolah

Berdasarkan struktur yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun dengan format yang lebih ringkas dan padat dibandingkan dengan ketentuan dalam regulasi sebelumnya. Meskipun demikian, secara substansi tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam isi dokumen Renstra.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 juga mempertegas pentingnya dua hal pokok dalam penyusunan Renstra, yaitu:

1. Penyusunan dokumen berbasis pada data yang aktual serta proyeksi kebutuhan jangka menengah;

2. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan (multipihak) guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses perencanaan.

Substansi Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan substansi RPD untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Renstra juga menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Keseluruhan pelaksanaan Renja diarahkan untuk mencapai target-target strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Selain sebagai pedoman perencanaan tahunan, Renstra Perangkat Daerah juga berperan sebagai instrumen pengukuran dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan. Evaluasi atas capaian Renstra dilakukan dengan mengacu pada hasil evaluasi tahunan Renja Perangkat Daerah.

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025–2029 tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan Penajam Paser Utara sebagai kabupaten dengan infrastruktur yang tangguh, tata ruang yang berkelanjutan, serta permukiman yang inklusif dan layak huni.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahlin 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
21. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2033;
23. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029;
25. Laporan Induk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023;
26. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029;

27. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025–2029 bertujuan untuk menyediakan arah kebijakan pembangunan jangka menengah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi DPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025–2029.

Tujuan utama dari penyusunan dokumen Renstra ini antara lain:

1. Menjadi panduan kerja bagi dinas dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Menjadi dasar dalam perumusan rencana kerja tahunan DPUPR selama periode 2025–2029;
3. Berfungsi sebagai acuan dalam proses pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah;
4. Memberikan informasi yang transparan dan terstruktur kepada para pemangku kepentingan mengenai program dan kegiatan yang direncanakan dalam lima tahun ke depan; dan
5. Menjadi referensi bagi penyusunan Renstra perangkat daerah lain di lingkup Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya dalam aspek yang terkait dengan infrastruktur dan penataan ruang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 yakni terdiri dari 5 (lima) bab. Sistematika dokumen dimaksud sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Secara umum bab pendahuluan berisi tentang latar belakang pelaksanaan kegiatan, peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029, dengan isi sub-bab sebagai berikut:

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar hukum penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya, dan kelompok sasaran layanan, dengan tambahan subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah. Berikut subbab-subbab dalam Bab II:

2.1. Gambaran Layanan Daerah

Berisi subbab tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah; dan kelompok sasaran layanan DPUPR

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi subbab permasalahan dan isu strategis DPUPR

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029, sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029, strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan

sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan subbab sebagai berikut:

3.1. Tujuan Rensrta DPUPR
3.2. Sasaran Renstra DPUPR
3.3. Strategi Renstra DPUPR
3.4. Arah Kebijakan DPUPR

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi subbab mengenai Program Perangkat Daerah dan subbab kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Rincian subbab dalam Bab IV:

4.1. Uraian Program Renstra DPUPR
4.2. Uraian Kegiatan Renstra DPUPR
4.3. Uraian Subkegiatan Renstra DPUPR
4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPR 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR
4.5. Target Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Layanan Daerah

2.1.a. Tugas, Fungsi, dan Struktur DPUPR

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan lembaga teknis daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam menjalankan tugasnya, kepala dinas bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada;
b. perumusan dan pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
c. pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja sesuai dengan ketentuan;
d. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas Pekeqiaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja;
e. penetapan Standar operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;

f. perumusan kebijakan dan pengoordinasian di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi bina marga, cipta karya, pengairan, tata ruang dan bina konstruksi;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruarlg yang meliputi bina marga, cipta karya, pengairan, tata ruang dan bina konstruksi;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. pelaksanaan pelaporan capaian kineda dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan;
k. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai bahan pertanggungiawaban;
m. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
n. pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
o. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintah bidang pekeqiaan umum dan penataan ruang;
p. pelaksanaan pengendalian tugas di unit kerjanya;
q. pelaporan, pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan
r. pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertangung jawab kepada kepala dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian petunjuk penyusunan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan RPJMD sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
b. penyusunan rencana keda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan Ernggaran;
c. perumusan perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan yang berlalu;
d. penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. pengoordinasian penyusunan dan mensosialisasikan Standar Operasional Prosdur (SOP) dan Standar pelayanan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
f. pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g. pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian dan administrasi umum pada Dinas Pekedaan Umum dan Penataan Ruang;
h. pelaksanaan administrasi keuangan dan pendapatan daerah kewenangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
i. pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
j. pelaksanaan penyiapan bahan pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
k. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
l. pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

m. fasilitasi penataan organisasi dan tatalaksana pada Dinas Pekedaan Umum dan Penataan Ruang;
n. fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pekedaan Umum dan Penataan Ruang;
o. pengoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
p. pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
q. pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas Pekedaan Umum dan Penataan Ruang, serta pengelolaan keuangan secara berkala yang meiputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. pemberian petunjuk penyiapan bahan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan yang berlaku;
s. pemberian petunjuk penyiapan bahan pembinaan kelompok Jabatan Fungsional dan bahan penyusunan rencana kebutuhan ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
t. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyelenggaraan keg'asama dengan pihak atau instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Kesekretariatan sebagai bahan pertanggungiawaban;
v. pelaksanaan pengendalian tugas di unit kerjanya;
w. pelaporan, pemberian saran dan petimbangan teknis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang kesekretariatan;
x. pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat membawahkan subbagian, yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris yakni:

a. perencanaan kegiatan Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

b. penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
c. penyusunan dan pengoordinasian Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dan rapat-rapat;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan dan rumah tangga, layanan publikasi dan hubungan masyarakat;
f. pelaksanaan dan penyiapan bahan penataan organisasi dan tatalaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Subbagian Umum sebagai bahan pertanggungjawaban
h. pelaksanaan pengendalian tugas di unit kerjanya; pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang Umum;
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugasnya yakni melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, melalui penyelenggaraan fungsi:

a. perencanaan program bidang bina marga sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Pekeraan Umum dan Penataan Ruang;
b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kela dan penyanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Bina Marga berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
d. pemberian petunjuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Bina Marga Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. pelaksanaan koordinasi pemprograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
f. pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
g. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
h. pelaksanaan sistem drainase badan jalan mencakup perencanaan, pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan pengendalian air pada badan jalan;
i. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Bina Marga sebagai bahan pertanggungjawaban;
k. pelaksanaan pengendalian tugas di unit kerjanya;
l. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang Bina Marga; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi;

4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang cipta karya. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan program Bidang Cipta Karya Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas

Pekedaan Umum dan Penataan Ruang;

b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan pejanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Cipta Karya berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
d. pemberian petunjuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Cipta Karya Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. perumusan kebijakan Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, penataan bangunan gedung dan pengembangan sarana dan prasarana strategis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Cipta Karya sebagai bahan pertanggungjawaban;
g. pelaksanaan pengendalian tugas di unit kerjanya;
h. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang Cipta Karya; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi;

5. Bidang Pengairan

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengairan melalui penyelenggaraan fungsi:

a. perencanaan proglam Bidang Pengairan Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pengairan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
d. pemberian petunjuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pengairan Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
f. perencanaan, Pelaksanaan dan pengawasan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan dalam rangka Konservasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Air pada Sungai, Pantai, Bendungan, Embung dan Tampungan air lainnya, saluran pembuang, irigasi, rawa, air tanah dan air baku;
g. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Operasi dan Pemeliharaan (O&P);
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Pengairan sebagai bahan pertanggungjawaban;
i. pelaksanaan pengendalian tugas di unit kerjanya;
j. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Pekeqiaan Umum dan Penataan Ruang sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang Pengairan; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi.

6. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang dengan menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan program Bidang Tata Ruang Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan pelanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Tata Ruang berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
d. pemberian petunjuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Tata Ruang Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengaturan penataan ruang, perencanaan tata ruang, pemanfataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan, pembinaan, dan kelembagaan penataan ruang;
f. pelaksanaan upaya peningkatan informasi publik terkait tata ruang;
g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penataan ruang Kabupaten;
h. pelaksanaan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dan sumber daya manusia bidang tata ruang;
i. penyiapan bahan dan fasilitasi Kerjasama penataan ruang;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Tata Ruang sebagai bahan pertanggungjawaban;
k. pelaksanaan pengendalian tugas di unit kerjanya;
l. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Pekedaan Umum dan Penataan Ruang sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang Tata Ruang; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi.

7. Bidang Bina Konstruksi

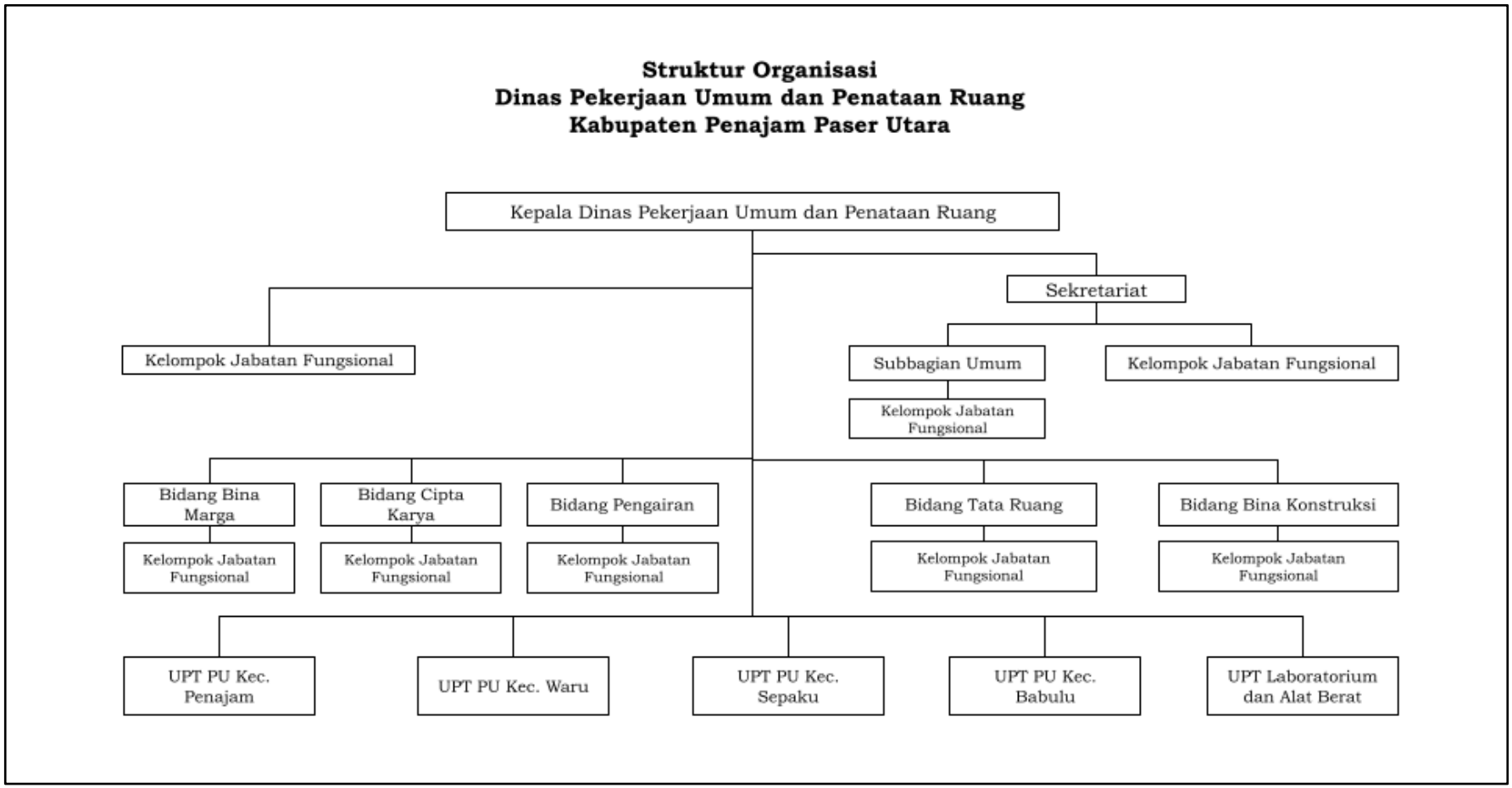
Bidang Bina Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina konstruksi, dengan menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan program Bidang Bina Konstruksi Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Bina Konstruksi berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
d. pemberian petunjuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Bina Konstruksi Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
f. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
g. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga terampil konstruksi;
h. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
i. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
j. pelaksanaan kebijakan pembinaan penyebarluasan peraturan perundang-undangan penyelengaraan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
k. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
l. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
m. pelaksanaan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah Daerah;
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Bina Konstruksi sebagai bahan pertanggungiawaban;
o. pelaksanaan pengendalian tugas di unit kegitannya;

p. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang Bina Konstruksi; dan
q. pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber: Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

2.1.b. Sumber Daya DPUPR

1. Kondisi Kepegawaian

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki sumber daya manusia per25 Juni 2025 adalah sebanyak 338 orang yang diklasifikasikan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta data pejabat struktural Tahun 2025.

Adapun rincian sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

Tabel II. 1
Data Pegawai Pejabat Eselon Berdasarkan Bidang
Tahun 2025

GOLONGAN/MASA KERJA	BINA MARGA	CIPTA KARYA	PENGAI-RAN	SEKRE-TARIAT	TATA RUANG	BINA KONS-TRUKSI	UPT PU KEC. BABULU	UPT PU KEC. PENAJAM	UPT PU KEC. SEPAKU	UPT PU KEC. WARU	UPT LAB. & ALAT BERAT	TOTAL
PNS												
Eselon II.b				1								1
Eselon III.a				1								1
Eselon III.b	1		1		1	1						4
Eselon IV.a				1			1	1	1	1	1	6
Eselon IV.b							1	1	1	1	1	5
Total	**1**		**1**	**3**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**17**
Pembina TK.I / IV/b												
Pembina / IV/a												
Penata TK.I / III/d		2	1	1	1							5
Penata / III/c	1	2	1	3							1	8
Penata Muda TK.I / III/b	6		3	1	1	1						12
Penata Muda / III/a	4	4	4	4	5	5	1	2	2		2	33
Pengatur TK.I / II/d							1				1	2
Pengatur / II/c	1	1	1		1	2						6
Pengatur Muda TK.I / II/b											1	1
Total	**12**	**9**	**10**	**9**	**8**	**8**	**2**	**2**	**2**		**5**	**67**
PPPK												
IX	4	1	2	1	3	2					2	15
V	8	1	1				1	2	1	1	1	16
I				1								1
Total	**12**	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	**3**	**32**
Tenaga Harian Lepas (THL)												
00 Tahun												
01 Tahun	3	1	1	3	1	1	1	2	6	2	4	25

GOLONGAN/MASA KERJA	BINA MARGA	CIPTA KARYA	PENGAI-RAN	SEKRE-TARIAT	TATA RUANG	BINA KONS-TRUKSI	UPT PU KEC. BABULU	UPT PU KEC. PENAJAM	UPT PU KEC. SEPAKU	UPT PU KEC. WARU	UPT LAB. & ALAT BERAT	TOTAL
02 Tahun			1									1
03 Tahun	6	4	4	2			3		3		1	23
04 Tahun	5		3	1		1	1	1	2	1	2	17
05 Tahun	3			8		1	2	1	4		2	21
06 Tahun	2		1				4		2			9
07 Tahun					2			1		1	1	5
08 Tahun	1	1					2	1		3	1	9
09 Tahun	3			1	1		4	4	3	2		18
10 Tahun	1		3				3	2		3		12
11 Tahun	2	3	2	1	1	1	1	5		3	3	22
12 Tahun	4	1					1	1		1		8
13 Tahun			2	1				2		1	4	10
14 Tahun	1		6	3		2		3		2	2	19
15 Tahun	4	2	1			1	1	8		1	1	19
16 Tahun			1					1				2
17 Tahun	1											1
18 Tahun	1											1
19 Tahun	1											1
Total	**38**	**12**	**25**	**20**	**5**	**7**	**23**	**32**	**20**	**20**	**21**	**223**
Jumlah Pegawai	**63**	**23**	**39**	**34**	**17**	**17**	**28**	**38**	**25**	**23**	**31**	**338**

Sumber: Data kepegawaian DPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025

Tabel II. 2

Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

TINGKAT PENDIDIKAN	BINA MARGA	CIPTA KARYA	PENGAI-RAN	SEKRE-TARIAT	TATA RUANG	BINA KONS-TRUKSI	UPT PU KEC. BABULU	UPT PU KEC. PENAJAM	UPT PU KEC. SEPAKU	UPT PU KEC. WARU	UPT LAB. & ALAT BERAT	TOTAL
PNS												
S.II				3				1			1	5
S.I	9	6	7	7	8	5	2	2	2	2	2	52
D.III	3		1		1	1	1		1		1	9
SMA		2	1	1		1	1	1			1	8
SMK		1	2			1			1		1	6
STM	1			1							1	3
Jumlah Pegawai	**13**	**9**	**11**	**12**	**9**	**8**	**4**	**4**	**4**	**2**	**7**	**83**
PPPK												
S.I	4	1	2	1	3	2					2	15
SMA	3						1	1			1	6
SLTA			1									1
SMK	5	1						1	1			7
SMU												1
Paket C										1		1
SD				1								1
Jumlah Pegawai	**12**	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	**3**	**32**
Tenaga Harian Lepas (THL)												
Setara D.I										1		1
Setara D.II								1			1	2
Setara D.III	1	2		1		1	3	1	1	1		11
Setara S.I	9	4	9	6	3	3	5	3	3	1	10	56
Setara SD	1							1			1	3
Setara SMA	25	6	15	9	2	3	14	26	15	17	9	141
Setara SMP	2		1	4			1		1			9
Jumlah Pegawai	**38**	**12**	**25**	**20**	**5**	**7**	**23**	**32**	**20**	**20**	**21**	**223**
Total Pegawai	**63**	**23**	**39**	**34**	**17**	**17**	**28**	**38**	**25**	**23**	**31**	**338**

Sumber: Data kepegawaian DPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025

2. Kondisi Sarana Prasarana

Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan, perangkat daerah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal. Total tercatat 2.690 unit peralatan, mencakup berbagai jenis sarana teknis, administrasi, komunikasi, laboratorium, transportasi, dan perlengkapan pendukung lainnya. Ketersediaan peralatan ini tidak hanya memperkuat kemampuan operasional perangkat daerah, tetapi juga meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Rincian per kategori utama beserta jumlah unit masing-masing adalah sebagai berikut:

1. **Alat Angkutan (114 unit)** mendukung mobilitas operasional perangkat daerah, terdiri dari Dump Truck sebanyak 20 unit, Pick Up sebanyak 23 unit, Sepeda Motor sebanyak 69 unit, Mini Bus sebanyak 1 unit, dan Mobil Tangki Air sebanyak 1 unit, yang semuanya digunakan untuk mendukung kegiatan lapangan dan transportasi internal.
2. **Alat Bengkel dan Alat Ukur (97 unit)** digunakan untuk kegiatan teknis, perawatan, konstruksi, dan pengukuran, terdiri dari Dongkrak Hidrolik 3 unit, Concrete Cutter 2 unit, Concrete Mixer 5 unit, Mesin Bor 6 unit, Mesin Gerinda 4 unit, Mesin Gerinda Tangan 1 unit, Mesin Las Listrik 4 unit, Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu) 1 unit, Mesin Ketik Manual Portable 4 unit, Alat Ukur Universal 6 unit, Alat Ukur Sigmat 1 unit, Alat Ukur Lain-lain 2 unit, Peralatan Ukur, Gip dan Feeting 11 unit, dan Perkakas Bengkel Service 1 unit, yang semuanya mendukung keperluan pemeliharaan, pengukuran teknis, dan pelaksanaan proyek konstruksi internal.
3. **Alat Besar (127 unit)** digunakan untuk pekerjaan konstruksi, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur, terdiri dari Backhoe Loader 2 unit, Crawler Excavator + Attachment 14 unit, Floating Excavator + Attachment 2 unit, Grader 7 unit, Vibration Roller 9 unit, Buldozer 4 unit, Asphalt Finisher 1 unit, Asphalt Mixing Plant 1 unit,

Asphalt Recycle 1 unit, dan Stabilisator 1 unit, yang secara keseluruhan memperkuat kemampuan teknis dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

4. **Alat Kantor dan Rumah Tangga (1.555 unit)** digunakan untuk menunjang kegiatan administrasi, manajemen, dan pelayanan publik, terdiri dari Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 286 unit, Kursi Rapat 185 unit, Kursi Kerja Pejabat 102 unit, Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 unit, Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2 unit, Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 11 unit, Kursi Tamu 21 unit, Kursi Putar 40 unit, Kursi Lipat 30 unit, Kursi Biasa 15 unit, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD 2 unit, Meja Kerja Pegawai Non Struktural 53 unit, Meja Kerja 24 unit, Meja Kerja Pejabat 28 unit, Meja Kerja Pejabat Eselon I 5 unit, Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 unit, Meja Kerja Pejabat Eselon III 5 unit, Meja Kerja Pejabat Eselon IV 17 unit, Meja Rapat 13 unit, Meja Rapat Pejabat 1 unit, Meja Komputer 2 unit, Meja Resepsionis 14 unit, Meja Tamu Biasa 23 unit, Meja Bayi 1 unit, Meja Bundar 1 unit, Bangku Tunggu 1 unit, Laptop 104 unit, P.C. Unit 88 unit, Printer 115 unit, Scanner 29 unit, External/Portable Hardisk 20 unit, CPU (Peralatan Personal Komputer) 4 unit, Keyboard 7 unit, Tablet PC 7 unit, Uninterruptible Power Supply 19 unit, Filing Cabinet Besi 28 unit, Lemari Kayu 52 unit, Lemari Kaca 42 unit, Lemari Besi/Metal 16 unit, Lemari Buku Arsip untuk Pejabat Eselon II 35 unit, Lemari Buku Arsip untuk Pejabat Eselon III 38 unit, Lemari dan Arsip Pejabat 4 unit, Lemari Display 7 unit, Buffet 1 unit, Brandkas 4 unit, Dispenser 2 unit, Kipas Angin 4 unit, LCD Projector/Infocus 4 unit, Karpet 18 unit, Papan Nama Instansi 3 unit, Papan Pengumuman 1 unit, Partisi 29 unit, Gordyin/Kray 6 unit, Kasur/Spring Bed 1 unit, Kaca Hias 1 unit, Televisi 13 unit, Sound System 1 unit, Tenda 1 unit, dan Teralis 1 unit. Semua peralatan ini menunjang kelancaran kegiatan

administratif, kenyamanan ruang kerja, dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

5. **Alat Kedokteran dan Kesehatan (2 unit)** terdiri dari alat kesehatan internal yang digunakan untuk mendukung kegiatan medis dan keselamatan pegawai.

6. **Alat Keselamatan Kerja (35 unit)** terdiri dari helm, sepatu keselamatan, rompi, dan perlengkapan pelindung diri lainnya, yang digunakan untuk menjamin keselamatan pegawai dalam melaksanakan tugas lapangan.

7. **Alat Laboratorium (180 unit)** digunakan untuk penelitian, pengujian, dan kegiatan laboratorium, terdiri dari Alat Laboratorium Pertanian 62 unit, Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 19 unit, Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan 12 unit, Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia 9 unit, Polarimeter 30 unit, CBR Lab Set Cl.284 4 unit, Distiling Apparatus 1 unit, Fermentor 1 unit, Lightweight Concrete Test Hammer 1 unit, Liquid Limit 1 unit, Slump Test Set 2 unit, Silinder Materi 10 unit, dan Volumetric Glass 6 unit. Semua peralatan ini mendukung kegiatan penelitian, pengujian material, dan analisis laboratorium secara profesional.

8. **Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (95 unit)** terdiri dari Camera Digital 29 unit, Camera Video 3 unit, Camera Conference 2 unit, Handy Cam 12 unit, Handy Talky 22 unit, GPS 1 unit, Global Positioning System 22 unit, Tripod Compass 1 unit, Tripod Camera 1 unit, Theodolite 1 unit, Frequency Inverter 1 unit, dan peralatan studio lainnya 1 unit. Peralatan ini mendukung dokumentasi, komunikasi, dan pengukuran lokasi secara akurat.

9. **Komputer (417 unit)** terdiri dari P.C. Unit 88 unit, Laptop 104 unit, Komputer Jaringan 11 unit, Printer 115 unit, Scanner 29 unit, External/Portable Hardisk 20 unit, CPU 4 unit, Keyboard 7 unit, Tablet PC 7 unit, dan UPS 19 unit, yang digunakan untuk

menunjang kegiatan administrasi, pengolahan data, dan sistem jaringan internal.

10. **Peralatan Olahraga (2 unit)** terdiri dari Peralatan Permainan 2 unit, digunakan untuk kegiatan olahraga dan kebugaran pegawai.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut secara lengkap, perangkat daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif, efisien, dan profesional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.c. Kinerja Pelayanan DPUPR

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara mencakup penyelenggaraan urusan pekerjaan umum serta penataan ruang yang diarahkan untuk mendukung perkembangan daerah. Pembangunan infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang aktivitas sosial dan ekonomi difokuskan pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan wilayah.

Capaian kinerja dinas dapat ditinjau melalui data dan informasi dalam beberapa tahun terakhir. Rekam data sejak tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan adanya tren peningkatan pada sejumlah indikator, meskipun masih terdapat beberapa capaian yang mengalami penurunan. Beberapa aspek layanan yang memerlukan perhatian khusus antara lain kondisi jalan kabupaten dalam kategori baik, persentase pembangunan turap pada jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor, serta luas permukiman yang tertata. Data kinerja dinas secara lebih lengkap dari tahun 2019 hingga 2025 disajikan pada tabel berikut, dengan catatan bahwa terdapat tahun tertentu tanpa capaian data akibat perubahan dokumen perencanaan maupun kebijakan di tingkat pemerintah pusat.

Tabel II. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
	Indikator Kinerja Tahun 2021		**2021**	
1	Realisasi Jalan Mantap	%	10,97	5,13
2	Persentase Terbangunannya Saluran Pembuangan Kondisi Baik	%	19,17	64,51
3	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	0,085	0,043
4	Persentase Banguna/Gedung Terbanguna	%	46,15	28,205
5	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Air Bersih	SR	1327	2066
6	Persentase Jalan yangg terlayani JPU	%	26	8
7	Ketersediaan Regulasi Tata Ruang	Dokumen	1	1
	Indikator Kinerja Tahun 2022		**2022**	
1	Persentase Jalan Mantap	%	35,95	26,43
2	Persentase Terbangunnnya Saluran Pembuangan Kondisi Baik	%	47,92	52,99
3	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	40,91	23,49
4	Persentase Bangun/Gedung Terbangun	%	5,88	
5	Persentase Penduduk yang berkases Air Minum	%	9,68	30,18
6	Rasio Elektrifitas	%	9,62	30,18
7	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	25	55
8	Cakupan Pelaksaaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	%	33,85	98,91
9	Persentase Layanan Publik pada Dinas PUPR	%	80,92	96,04
10	Persentase Layanan Laboratorium Pengujian	%	15,72	21,54
	Indikator Kinerja Tahun 2023		**2023**	
1	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	37,48	43,39
2	Persentase terbangunnya saluran pembuang	%	5,57	6,02
3	Persentase terbangunnya saluran irigasi	%	2,06	10,48
4	Tersedia Fasilitas Pendukung Saranan dan Prasaran Pemerintah Dalam Kondisi Baik	Unit	50	54
5	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Terbangun	%	17,65	17,65
6	Persentase Jumlah Pendukung yang terayani Air Bersih	%	22,45	24,33
7	Jumlah penduduk yang memiliki sanitasi layak	%	37,73	64,70
8	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Memenuhi Standar Kualifikasi	%	25,00	82,00
9	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	60,00	74,67
10	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	%	55,23	110,33
11	Persentae Layanan Publik pada Dinas PUPR	%	100	81,06
12	Persentase layanan laboratorium pengujian	%	23,58	23,90
	Indikator Kinerja Tahun 2024		**2024**	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Prestasi Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	%	50	55,81
2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	%	100	82,51
3	Persentase Capaiana Kebutuhan Gedung Pemerintah Yang Terbangun	%	60	60
4	Persentase Pelayanan Uji Lab Terhadap Permintaan Konsumen	%	100	100
5	Persentase Rumah Tangga Sanitasi Tidak Layak	%	34,57	36,17
6	Persentase Saluran Drainase yang Baik	%	39,15	39,11
7	Persentase Cakupan Layanan Air Bersih	%	32	24,44
8	Persentase bangunan Sumber Daya Air yang merupakan Kewenangan Kabupaten	%	85,63	87,36
9	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	%	47	36,16
10	Persentase Capaian Bangunan Gedung yang Ber PBG/SLF	%	28	20,97
11	Penataan bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)	%	4	2
12	Predikat penyelenggaraan Penataan Ruang)	Status	Sedang	sedang

Sumber: LKjIP Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021-2024

Tabel II. 4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021-2024

No	Program	Anggaran				Realisasi				Rasio			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Rp16,394,078,318	Rp23,223,646,253	Rp30,493,612,719	Rp174,095,317,509	Rp8,518,826,710	Rp22,148,353,291	Rp26,900,831,774	Rp156,657,265,072	51.96%	95.37%	88.22%	89.98%
2	Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA)	Rp30,946,463,251	Rp11,569,217,118	Rp10,934,121,199	Rp84,643,134,615	Rp13,823,595,519	Rp10,917,218,741	Rp8,769,061,082	Rp82,241,228,395	44.67%	94.36%	80.20%	97.16%
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp19,617,444,254	Rp9,705,430,400	Rp13,050,885,114	Rp28,809,897,824	Rp4,559,280,520	Rp9,224,736,865	Rp12,754,180,952	Rp26,795,867,537	23.24%	95.05%	97.73%	93.01%
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp86,277,272,771	Rp81,933,601,732	Rp48,361,144,402	Rp28,050,696,954	Rp42,628,063,491	Rp77,649,034,665	Rp46,057,533,452	Rp27,921,504,517	49.41%	94.77%	95.24%	99.54%
5	Program Pengembangan Permukiman	Rp11,656,782,510	Rp6,336,918,805	Rp897,425,481	-	Rp6,149,997,308	Rp5,387,914,942	Rp855,682,640	-	52.76%	85.02%	95.35%	-
6	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp72,553,607,675	Rp43,326,698,318	Rp95,308,373,605	Rp3,200,615,241	Rp6,672,974,338	Rp37,833,049,887	Rp83,287,953,317	Rp2,525,273,898	9.20%	87.32%	87.39%	78.90%
7	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp34,862,790,748	Rp14,926,746,698	Rp41,314,371,524	Rp20,952,163,245	Rp6,303,653,526	Rp12,847,278,129	Rp34,108,487,214	Rp17,032,155,865	18.08%	86.07%	82.56%	81.29%
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp258,211,764,349	Rp160,714,869,775	Rp296,631,572,594	Rp310,564,321,732	Rp86,175,131,194	Rp137,659,085,849	Rp233,373,387,602	Rp290,954,457,594	33.37%	85.65%	78.67%	93.69%
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp101,003,030	Rp99,977,750	Rp549,909,500	Rp3,388,558,444	Rp3,059,000	Rp99,669,750	Rp404,455,275	Rp3,187,995,307	3.03%	99.69%	73.55%	94.08%
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp1,499,331,064	Rp1,090,798,522	Rp2,831,280,353	Rp1,242,139,978	Rp403,375,034	Rp739,434,254	Rp1,794,899,818	Rp1,046,751,742	26.90%	67.79%	63.40%	84.27%
11	Program Pengelolaan dan Pengembaangan Sistem Air Limbah	-	Rp4,154,336,000	Rp200,150,000	Rp307,578,045	-	Rp4,112,264,000	Rp191,505,350	Rp255,038,462	-	98.99%	95.68%	82.92%
Total		**Rp532,120,537,970**	**Rp352,927,905,371**	**Rp540,372,696,491**	**Rp655,254,423,587**	**Rp175,237,956,640**	**Rp318,618,040,373**	**Rp448,497,978,476**	**Rp608,617,538,389**	**32.93%**	**90.28%**	**83.00%**	**92.88%**

Sumber: LKjIP Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021-2024

Berdasarkan **Tabel II.3** menggambarkan capaian indikator kinerja pelayanan dari tahun 2021 hingga 2024. Beberapa indikator mengalami peningkatan signifikan seperti persentase terbangunnya saluran pembuangan kondisi baik dari 19,17% pada 2021 menjadi 39,11% pada 2024, dan persentase layanan publik pada Dinas PUPR yang konsisten di atas target. Namun, terdapat indikator yang belum mencapai target, seperti persentase cakupan layanan air bersih yang hanya mencapai 24,44% pada 2024 dari target 32%, dan persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yang hanya 36,16% dari target 47%. Hal ini menunjukkan masih ada tantangan dalam pemerataan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan drainase.

Berdasarkan **Tabel II.4** menunjukkan data anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021-2024. Secara umum, realisasi anggaran mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024, dengan persentase rasio tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 90,28%, sementara tahun 2021 hanya mencapai 32,93%. Hal ini menandakan adanya perbaikan pengelolaan anggaran di tahun-tahun berikutnya, meskipun pada tahun 2023 rasio sedikit turun menjadi 83,00%. Program dengan realisasi yang konsisten tinggi antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pengelolaan Sistem Air Limbah, sedangkan beberapa program seperti Penataan Bangunan dan Lingkungannya memiliki realisasi yang relatif rendah.

Berdasarkan evaluasi tersebut, beberapa permasalahan strategis yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran: Perlu perencanaan anggaran yang lebih realistis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar rasio realisasi mendekati 100% secara konsisten, dengan prioritas pada program yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
2. Percepatan Peningkatan Infrastruktur Dasar: Fokus pada indikator yang masih rendah seperti cakupan layanan air bersih dan kondisi

jalan, dengan mengalokasikan anggaran lebih besar serta memperkuat pengawasan proyek agar target tercapai.

3. Peningkatan Efisiensi dan Monitoring Kinerja: Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat serta berbasis teknologi agar progres kegiatan dapat dipantau secara *real-time*, sehingga kendala dapat segera diatasi untuk menghindari keterlambatan realisasi.

2.1.d. Kelompok Sasaran Layanan DPUPR

Kelompok sasaran layanan merupakan pihak-pihak yang menerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Identifikasi kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan yang dirancang dapat menjangkau pihak yang tepat serta mendukung pencapaian pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas, berkelanjutan, dan berkeadilan. Berikut merupakan rincian kelompok sasaran layanan utama DPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara.

1) Masyarakat Umum

Masyarakat umum merupakan penerima manfaat utama dari layanan infrastruktur dasar yang disediakan oleh DPUPR. Keberadaan infrastruktur jalan, penerangan, tata ruang, dan bangunan gedung memberikan pengaruh langsung terhadap kelancaran aktivitas sehari-hari warga.

(a) Bidang Bina Marga melayani masyarakat yang bermukim atau beraktivitas di sepanjang jalan kabupaten melalui pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan serta jembatan.

(b) Bidang Cipta Karya melayani masyarakat umum melalui penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan infrastruktur perkotaan lainnya. Selain itu, Bidang Cipta Karya juga memberikan layanan melalui penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

(c) **Bidang Tata Ruang** memberikan layanan berupa informasi, arahan pemanfaatan, serta pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendukung keteraturan pembangunan di masyarakat.

(d) **Bidang Pengairan** memberikan layanan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten. Selain itu, Bidang Pengairan juga melayani masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan melalui penyediaan dan pemeliharaan saluran drainase untuk mengendalikan banjir dan genangan.

(e) **Bidang Bina Konstruksi** memberikan layanan pelatihan dan pembinaan kepada pelaku jasa konstruksi, kontraktor lokal, serta tenaga kerja konstruksi. Layanan juga diberikan kepada tenaga terampil konstruksi dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah (SD–SMA) untuk meningkatkan kompetensi sesuai standar jasa konstruksi nasional.

(f) Sementara itu, terdapat peran lainnya dari **UPT Laboratorium dan Alat Berat** yang memberikan layanan bagi masyarakat atau penyedia yang membutuhkan pengujian bahan konstruksi serta dukungan teknis lain untuk menjamin mutu dan standar pembangunan.

(g) **Unit Pelaksana Teknis (UPT)** mendukung masyarakat di pedesaan melalui pelaksanaan pembukaan lahan, pembangunan jalan pertanian, saluran pembuang, dan infrastruktur dasar lainnya. UPT tersebut antara lain: (1) UPT PU Kecamatan Penajam; (2) UPT PU Kecamatan Waru; (3) UPT PU Kecamatan Babulu; (4) UPT PU Kecamatan Sepaku.

2) Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Keluarga dengan Anak Stunting

Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarga dengan anak stunting menjadi perhatian khusus DPUPR, mengingat keterbatasan akses mereka terhadap infrastruktur dasar yang layak. Penyediaan

layanan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan permukiman yang sehat.

(a) Bidang Cipta Karya memberikan layanan pembangunan dan penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi memadai.

(b) Bidang Cipta Karya juga menyediakan jaringan perpipaan air bersih, yang kemudian dioperasikan oleh PDAM sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan air minum yang lebih merata.

3) Petani dan Kelompok Tani

Petani dan kelompok tani merupakan sasaran penting dalam penyediaan infrastruktur irigasi, yang menjadi penopang utama kegiatan pertanian. Layanan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan mendukung ketahanan pangan di wilayah kabupaten.

4) Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Perangkat daerah pemerintah kabupaten juga menjadi kelompok sasaran layanan, khususnya dalam penyediaan gedung pemerintahan yang representatif. Layanan ini bertujuan mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

(a) Bidang Cipta Karya memberikan layanan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan gedung perkantoran pemerintahan daerah.

2.1.e. Mitra DPUPR dalam Pemberian Layanan

Mitra merupakan pihak-pihak yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan DPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara. Kolaborasi dengan mitra dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari penyediaan pendanaan, dukungan teknis, hingga keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kehadiran mitra ini penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Berikut merupakan kelompok mitra utama DPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara.

1) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Perangkat daerah lain di lingkup Pemerintah Kabupaten merupakan mitra penting DPUPR dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kolaborasi ini dilakukan untuk memastikan integrasi program lintas sektor, misalnya dengan Bappeda, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Perhubungan, agar pembangunan infrastruktur berjalan terpadu sesuai prioritas pembangunan daerah.

2) Perusahaan Daerah dan BUMD

Perusahaan daerah, terutama PDAM, menjadi mitra utama DPUPR dalam penyediaan layanan air bersih. DPUPR berperan menyediakan infrastruktur jaringan dan sarana air minum, sedangkan PDAM mengoperasikan dan mendistribusikan layanan kepada masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan pelayanan air minum berjalan optimal dengan pembagian peran yang jelas antara penyedia infrastruktur dan operator layanan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis DPUPR

2.2.a. Permasalahan

Permasalahan dalam pembangunan pada dasarnya merupakan bentuk kesenjangan, baik antara capaian pembangunan yang telah diraih dengan target yang telah direncanakan, maupun antara kondisi ideal yang ingin diwujudkan di masa depan dengan situasi nyata saat dokumen perencanaan disusun. Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara dihadapkan pada sejumlah persoalan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Permasalahan yang dibahas dalam subbab ini merupakan bagian dari isu-isu penyelenggaraan pemerintahan daerah di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang yang memiliki dampak signifikan, daya ungkit tinggi terhadap pencapaian tujuan pembangunan, serta menjadi perhatian dan prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan memerlukan pendekatan penanganan yang terstruktur.

Secara sistematis, permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dijabarkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok yang dihadapi Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini adalah **belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang serta pemenuhan infrastruktur dasar**. Ketidakoptimalan tersebut meliputi berbagai aspek, antara lain kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai, keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta belum maksimalnya implementasi sistem pendukung yang mendukung pelayanan secara efektif dan efisien.

Struktur permasalahan yang lebih rinci, termasuk identifikasi masalah turunan dan akar penyebabnya, dapat dilihat pada Tabel II.6, yang disusun untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah dalam upaya penyusunan solusi dan kebijakan perbaikan ke depan.

Tabel II. 5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	PENYEBAB MASALAH /AKAR MASALAH
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang serta pemenuhan infrastruktur dasar	**Belum Optimalnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar**	Masih Rendahnya Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan infrastruktur
		Masih rendahnya jalan dalam kondisi mantap
		Masih kurangnya alternatif konektifitas wilayah khususnya dalam menunjang ketahanan pangan dan pusat ekonomi
		Belum optimalnya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur terutama pada wilayah pedesaan
		Masih kurangnya ketersediaan air baku
		Masih rendahnya jaringan irigasi dalam kondisi baik
		Masih rendahnya kualitas saluran pembuang
		Masih adanya sanitasi masyarakat yang belum layak
		Masih rendahnya rumah tangga yang memiliki jaringan perpipaan air bersih
		Masih tingginya kebutuhan gedung pemerintah di Kabupaten Penajam Paser Utara
		Belum optimalnya iplementasi PBG dalam mendukung tertib pembangunan

MASALAH POKOK	MASALAH	PENYEBAB MASALAH /AKAR MASALAH
		Belum Optimalnya Penyerapan Tenaga Kerja Konstruksi di PPU
	Belum Optimalnya Kualitas Penataan Ruang	Belum ditetapkannya perda Revisi RTRW terkait adanya perubahan fungsi ruang, alih lahan dan kebutuhan baru akibat hadirnya IKN
		Belum ditetapkannya perbup RDTR yang telah disusun sebagai arahan lebih teknis dan operasional dalam penataan ruang wilayah
		Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang daerah
		Adanya Alih Fungsi Lahan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2.2.b. Isu Strategis

Isu strategis merupakan hal-hal penting yang perlu menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pemerintahan. Isu-isu ini bersifat mendasar, mendesak, berdampak jangka menengah, dan menentukan arah kebijakan ke depan. Penetapan isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara didasarkan pada identifikasi permasalahan aktual, hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta dinamika lingkungan eksternal, baik global, nasional, maupun regional, sehingga mampu mencerminkan tantangan utama yang harus direspons secara tepat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan tata ruang daerah.

1) Telaahan Isu KLHS Relevan dengan DPUPR

a) Telaahan Laporan Induk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

1. Belum Optimalnya Penanggulangan Bencana dan Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim

Belum Optimalnya Penanggulangan Bencana dan Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim menjadi salah satu isu strategis di Kabupaten Penajam Paser Utara. Wilayah ini memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap berbagai bencana alam,

terutama yang dipicu oleh kondisi hidrometeorologi dan perubahan iklim. Berdasarkan data, terdapat dua jenis banjir yang mengancam, yaitu banjir luapan sungai dan banjir genangan, dengan tingkat risiko sedang hingga tinggi. Luas wilayah yang berada pada kategori risiko tinggi untuk banjir mencapai 45.861,90 hektar atau 15,61% dari total wilayah. Selain itu, bencana cuaca ekstrem juga menjadi ancaman serius dengan luas wilayah kelas tinggi mencapai 42.595,19 hektar (14%) yang dapat memicu gangguan terhadap infrastruktur dan aktivitas masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pun menjadi potensi bencana signifikan, di mana wilayah berisiko tinggi mencapai 30.262,02 hektar (10,30%), sedangkan bencana tanah longsor menambah kerentanan dengan luas kelas tinggi sebesar 5.898,55 hektar (4,64%). Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko bencana tersebar di berbagai kawasan strategis, sehingga mengancam keselamatan penduduk, keberlanjutan ekosistem, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Tingginya potensi risiko bencana tersebut mencerminkan bahwa penanggulangan bencana dan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim di Penajam Paser Utara masih belum optimal. Berbagai keterbatasan, seperti minimnya integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan tata ruang, rendahnya kapasitas kelembagaan, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan sistem peringatan dini, menyebabkan wilayah ini tetap rentan terhadap dampak bencana. Perubahan iklim yang semakin ekstrem juga memperbesar intensitas dan frekuensi kejadian bencana, sehingga memperberat beban kerentanan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang lebih komprehensif untuk memperkuat ketahanan wilayah, termasuk melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan infrastruktur penanggulangan bencana yang adaptif terhadap perubahan iklim.

2. Masih minimnya penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah dan air bersih, serta sarana dan prasarana dasar permukiman layak

Masih minimnya penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah dan air bersih serta pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai terlihat dari rendahnya cakupan layanan pengelolaan sampah dan keterbatasan sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan data, hanya 28,38% penduduk yang terlayani oleh sistem penampungan dan pengangkutan sampah, sementara 51,35% masih membuang sampah dengan cara ditanam dalam lubang atau dibakar, 13,51% dibuang ke sungai atau saluran irigasi, dan 6,67% dibuang ke drainase. Kondisi ini terjadi di tengah timbulan sampah yang cukup besar, yaitu sekitar 93.400,15 kg per hari pada tahun 2021, sehingga menimbulkan potensi pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat.

Untuk penyediaan air bersih, sebagian besar penduduk (74,91%) masih bergantung pada sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan sambungan leding, sedangkan 9,12% menggunakan sumber air yang tidak terlindungi dan 15,98% mengandalkan mata air atau air hujan. Sementara untuk kebutuhan air minum, 92,59% masyarakat menggunakan air isi ulang dan 7,41% menggunakan air sumur. Data ini menunjukkan bahwa akses terhadap air bersih yang aman dan berkelanjutan masih terbatas, sehingga rentan terhadap gangguan kualitas dan kuantitas air. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan infrastruktur pengelolaan persampahan dan penyediaan air bersih yang lebih memadai, serta penguatan pelayanan sarana prasarana dasar permukiman untuk mendukung kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan permukiman yang sehat dan layak huni.

b) Telaahan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

1. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi merupakan salah satu sasaran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebagai daerah yang sedang berkembang dan menjadi bagian dari kawasan strategis nasional, termasuk penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, PPU membutuhkan infrastruktur yang tidak hanya memadai tetapi juga tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim. Hal ini meliputi penguatan jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat kegiatan, penyediaan sistem air bersih dan sanitasi yang layak, pengelolaan energi yang andal, serta pengembangan teknologi informasi untuk mendukung layanan publik dan aktivitas ekonomi.

2. Masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dan sanitasi

Masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dan sanitasi menunjukkan bahwa pelayanan dasar permukiman di Kabupaten Penajam Paser Utara belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan data tahun 2022, capaian akses air minum layak baru mencapai 65,95%, sehingga masih terdapat sekitar sepertiga rumah tangga yang belum mendapatkan layanan air minum yang memenuhi standar kualitas dan keberlanjutan. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat, terutama terkait penyakit yang ditularkan melalui air. Sementara itu, meskipun akses sanitasi layak telah mencapai 93,42%, masih ada sebagian kecil rumah tangga yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat, yang berpotensi menyebabkan

pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Capaian ini menunjukkan perlunya upaya penguatan infrastruktur dan peningkatan pelayanan akses air minum aman serta sanitasi layak secara merata di seluruh wilayah, khususnya pada daerah yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan sumber daya.

3. Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan RTRW

Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan RTRW menjadi salah satu permasalahan strategis yang berdampak pada ketertiban tata ruang dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Masih ditemukan praktik pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik untuk kegiatan permukiman, pertanian, maupun kegiatan usaha lainnya. Ketidaksesuaian ini terjadi akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan sistem perizinan yang terintegrasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan terhadap tata ruang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang, degradasi lingkungan, berkurangnya daya dukung dan daya tampung wilayah, serta meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan longsor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk melalui peningkatan kapasitas pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, penegakan sanksi, serta harmonisasi regulasi yang mendukung implementasi RTRW secara konsisten.

3. Kesenjangan antara pembangunan fisik dan daya dukung lingkungan

Kesenjangan antara pembangunan fisik dan daya dukung lingkungan menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pertumbuhan pembangunan fisik seperti infrastruktur

transportasi, kawasan permukiman, dan fasilitas publik sering kali tidak sejalan dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau, meningkatnya alih fungsi lahan, serta kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Ketidakseimbangan ini juga dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, pencemaran air dan tanah, serta menurunkan keberlanjutan ekosistem yang ada.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup secara optimal. Jika tidak diatasi, kesenjangan ini akan menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat, kelangsungan sumber daya alam, dan kualitas hidup di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan tata ruang berbasis lingkungan, optimalisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan pembangunan fisik berjalan selaras dengan daya dukung lingkungan.

2) Telaahan Isu Lingkungan Dinamis Relevan dengan DPUPR

a) Telaahan Isu Global

Penguatan pemahaman terhadap isu-isu global menjadi aspek yang sangat penting dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Isu-isu tersebut tidak hanya berdampak pada skala internasional, tetapi juga membawa pengaruh langsung terhadap arah dan keberlanjutan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, perencanaan infrastruktur dasar, pengelolaan ruang wilayah, serta penyediaan fasilitas publik yang adaptif dan berkelanjutan perlu mempertimbangkan konteks tantangan global secara lebih menyeluruh. Berikut ini adalah beberapa isu global yang memiliki keterkaitan erat dengan peran DPUPR:

1. **Urbanisasi Dunia yang Meningkat**

Laju urbanisasi global yang terus meningkat mendorong pertumbuhan kawasan perkotaan, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai wilayah strategis penyangga IKN. Tekanan terhadap penyediaan perumahan, air bersih, sanitasi, transportasi, dan infrastruktur dasar lainnya semakin besar. Hal ini berpotensi memperlebar ketimpangan layanan antarwilayah serta menekan keberadaan ruang terbuka hijau dan sistem drainase alami. Kondisi tersebut meningkatkan risiko banjir, kekeringan, dan pencemaran lingkungan. DPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara dituntut untuk mampu merancang dan membangun infrastruktur yang tidak hanya mendukung pertumbuhan kota, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan melalui perencanaan yang berkelanjutan.

2. **Perubahan Demografi Global**

Pertumbuhan kelas menengah, baik secara nasional maupun regional, memicu perubahan kebutuhan masyarakat terhadap hunian dan layanan infrastruktur. Masyarakat menengah cenderung menuntut akses perumahan yang lebih layak, transportasi publik yang memadai, sistem air bersih dan sanitasi modern, serta fasilitas umum yang nyaman dan inklusif. Jika tidak diantisipasi dengan perencanaan yang matang, tekanan terhadap lahan, ruang, dan infrastruktur dapat menimbulkan ketidakmerataan pelayanan publik. Oleh karena itu, DPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara harus merumuskan strategi pembangunan yang adaptif, efisien dalam penggunaan ruang, dan mampu mengakomodasi kebutuhan kelompok menengah tanpa mengabaikan masyarakat berpenghasilan rendah.

3. **Tata Kelola Global dan Kebutuhan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan**

Perkembangan tata kelola global menuntut adanya sistem pemerintahan daerah yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis data. Tantangan nyata yang dihadapi Kabupaten Penajam Paser Utara adalah koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal, potensi tumpang

tindih kewenangan, serta keterbatasan kapasitas teknis dan pengawasan lapangan. Dalam konteks ini, DPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki peran strategis untuk mendorong tata kelola infrastruktur dan penataan ruang yang lebih transparan, akuntabel, serta terintegrasi dengan kebijakan lintas sektor maupun lintas wilayah. Reformasi tata kelola ini menjadi kunci dalam menjawab kompleksitas pembangunan daerah sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

b) Telaahan Isu Nasional

Telaahan terhadap isu-isu lingkungan strategis yang bersifat dinamis pada tingkat nasional menjadi hal yang relevan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara. Isu-isu tersebut antara lain tercermin dalam arah kebijakan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketiganya menjadi acuan penting dalam menyelaraskan perencanaan infrastruktur dan tata ruang di daerah agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

(1) Telaahan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan dengan horizon waktu 20 tahun, yaitu periode 2025–2045. Dokumen ini menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan strategis pembangunan lintas sektor dan wilayah secara berkesinambungan. Visi pembangunan nasional dalam RPJP 2025–2045 adalah “Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur”, yang menggambarkan cita-cita besar bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaya saing global, produktif, inklusif, dan berkelanjutan melalui transformasi sosial, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika zaman.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan nasional jangka panjang ditempuh melalui langkah-langkah transformasional yang terarah dan menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan. Arah pembangunan dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi dan agenda pembangunan nasional, yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas.
3. **Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.**
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi.
6. **Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.**
7. **Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.**
8. **Mewujudkan kesinambungan pembangunan.**

Sejalan dengan arah tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki keterkaitan erat dengan misi pembangunan ke-6, ke-7, dan ke-8, khususnya dalam mendukung isu strategis lingkungan hidup berkualitas. Keterlibatan dinas juga terkait dengan isu integrasi ekonomi domestik dan global, terutama melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara untuk memperkuat keterkaitan nilai tambah antarwilayah. Selain itu, isu perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menjadi fokus penting, terutama dalam pengembangan kota yang layak huni, inklusif, dan berbudaya melalui penyediaan perumahan yang memadai, air minum layak konsumsi, dan transportasi multimoda.

Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah wajib mengacu pada 8 (delapan) misi dan agenda

pembangunan nasional serta isu-isu strategis dalam RPJPN. Setiap perangkat daerah bertanggung jawab menyusun rencana strategis yang selaras dengan visi pembangunan nasional sekaligus mendukung prioritas pembangunan jangka panjang. Sasaran pokok dari masing-masing misi kemudian dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan pada setiap tahapan, yang selanjutnya dituangkan lebih rinci dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

(2) Telaahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Isu-isu strategis nasional merupakan faktor penting yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar pembangunan dapat berlangsung efektif serta mampu merespons berbagai tantangan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, telah dirumuskan 8 (delapan) Asta Cita atau Prioritas Nasional Pembangunan yang merupakan turunan dari Visi Presiden Republik Indonesia **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**, yaitu:

1. Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
2. Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan *agromaritim industry* di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,

kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

5. Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. **Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.**
7. Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Dari delapan asta cita tersebut, isu pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki keterkaitan erat dengan Prioritas Nasional 6, yakni membangun dari desa untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.

Dalam konteks jangka menengah, terdapat isu yang relevan dengan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu peningkatan infrastruktur dasar dan pendukung yang berkelanjutan. Isu ini dijabarkan dalam RPJMN 2025–2029, antara lain:.

1. Belum optimalnya keterhunian dan pengelolaan rumah sehingga berpotensi pada menurunnya kualitas bangunan beserta lingkungan.
2. Belum optimalnya integrasi antara intervensi penyediaan perumahan dengan infrastruktur dasar permukiman dan akses transportasi publik yang berpotensi pada tumbuhnya permukiman kumuh baru.

Berdasarkan hasil capaian pembangunan sebelumnya, perhatian utama diarahkan pada pemenuhan infrastruktur dasar, penyediaan

infrastruktur pendukung, serta penguatan ekonomi sebagai fondasi pembangunan daerah melalui Kegiatan Prioritas Utama, yaitu:

1. Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan Ibu Kota Nusantara;
2. Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU; dan
3. Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa.

Upaya tersebut sekaligus menjadi fondasi yang kokoh bagi kesinambungan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terwujudnya pemerataan antarwilayah.

(3) Telaahan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota Negara bernama Nusantara (Ibu Kota Nusantara) merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi, yang wilayahnya ditetapkan sebagai pusat kedudukan Ibu Kota Negara. Ibu Kota Nusantara memiliki luas wilayah daratan sekitar 256.142 hektare serta perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektare. Dalam konteks pengembangan wilayah, IKN memanfaatkan keunggulan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sebagai pusat mitra, sekaligus berhubungan langsung dengan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai pintu masuk utama dari sisi selatan.

Batas wilayah IKN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022, yaitu::

1) Bagian Selatan: Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
2) Bagian Selatan: Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
3) Bagian Utara: Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
4) Bagian Timur: Selat Makassar.

Pembangunan IKN diarahkan menjadi superhub ekonomi dalam mendukung transformasi ekonomi nasional maupun regional Kalimantan Timur. Posisi Penajam Paser Utara sebagai daerah mitra strategis

menjadikan wilayah ini tidak hanya sebagai penyangga tetapi juga sebagai penerima manfaat langsung dari pertumbuhan baru.

c) Telaahan Isu Regional

Telaahan isu lingkungan hidup yang dinamis dan relevan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan pada skala kabupaten dengan tetap memperhatikan keterkaitan regional. Acuan utama telaahan ini bersumber dari dokumen perencanaan pembangunan, meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuapaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2033 dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025–2029.

(1) Telaahan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2033

Telaah RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa aspek infrastruktur dan penataan ruang masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan layanan air bersih, minimnya ketersediaan ruang terbuka hijau, hingga kondisi jaringan jalan yang sebagian besar rusak. Di sisi lain, potensi sumber daya air, keberadaan pusat-pusat permukiman, serta posisi strategis sebagai gerbang menuju Ibu Kota Nusantara memberikan peluang besar bagi pengembangan infrastruktur wilayah yang lebih terintegrasi.

Sejalan dengan hal tersebut, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berperan penting dalam mendukung keterpaduan ruang dan penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi dalam RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara yang relevan dengan urusan DPUPR Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut.

1. **Penguatan Pusat Pelayanan dan Permukiman**
   a. Penataan pusat kegiatan lokal (PKL) Koridor Penajam–Petung sebagai pusat pemerintahan dan jasa.
   b. Pengembangan pusat permukiman yang dilengkapi dengan prasarana sosial, ekonomi, dan infrastruktur dasar.

2. Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas

a. Optimalisasi jaringan jalan yang ada serta pembangunan jalan baru untuk mendukung aksesibilitas wilayah.
b. Pengembangan sistem transportasi intermoda yang menghubungkan pusat kegiatan ekonomi dengan kawasan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata.
c. Peningkatan sarana prasarana sumber daya air untuk penyediaan air baku air minum.
d. Pengembangan jaringan drainase di kawasan perkotaan untuk mengatasi genangan dan banjir.
e. Peningkatan pengelolaan persampahan dan limbah melalui sarana prasarana yang memadai.

3. Pemanfaatan Ruang Budidaya Berwawasan Lingkungan

a. Penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri dengan prinsip ramah lingkungan.

(2) Telaahan Rancangan Akhir Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2025-2029

Sesuai dengan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 menetapkan visi, yaitu "**Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara".** Berdasarkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029, dirumuskan 6 (enam) misi yang berperan sebagai panduan yang mengarahkan upaya untuk mencapai hasil pembangunan yang diinginkan.

Adapun 6 (enam) misi RPJM Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing [Misi 1]

2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam kerangka inovasi dan digitalisasi pelayanan publik [Misi 2]**
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan inklusif [Misi 3]
4. Mewujudkan ketahanan pangan daerah [Misi 4]
5. Mewujudkan Pembangunan Sosial Budaya dalam Bingkai Keberagaman [Misi 5]
6. **Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan [Misi 6]**

Keenam misi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupate Penajam Paser Utara. Telaahan isu lingkungan hidup yang relevan bagi **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara berorientasi pada Misi ke-6 RPJMD,** yaitu *mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.* Hal ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, serta ramah lingkungan sebagai penopang interaksi antarwilayah dan pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Posisi strategis Kabupaten Penajam Paser Utara yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara menjadikan kebutuhan infrastruktur dasar, seperti jaringan jalan, air minum, irigasi, dan drainase, semakin mendesak untuk ditingkatkan secara kuantitas maupun kualitas.

Selain itu, keberlanjutan pembangunan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik, tetapi juga pada ketahanan ekologi. Artinya, perencanaan dan implementasi pembangunan harus dilaksanakan secara bijak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, mencegah degradasi ekosistem, serta mendorong integrasi konsep pembangunan hijau dalam setiap program. Dengan pendekatan tersebut, pemerataan infrastruktur dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya memperkuat

konektivitas dan ekonomi daerah, tetapi juga memastikan kualitas lingkungan tetap lestari untuk generasi mendatang.

3) Penetapan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029

Isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis daerah, permasalahan pelayanan dinas, serta potensi, peluang, dan tantangan pembangunan lima tahun ke depan. Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi faktor penting yang harus diperhatikan, mengingat PPU merupakan wilayah penyangga utama yang secara langsung terdampak oleh pembangunan dan pengembangan infrastruktur IKN. Hal ini menuntut adanya dukungan, sinergi, dan kesiapan infrastruktur di Kabupaten PPU agar mampu berperan optimal dalam mendukung pertumbuhan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta tugas dan fungsi urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dinas, maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara pada periode 2025–2029, yaitu:

1. Belum Optimalnya Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian.

Tabel 2. 1
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH		ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH					ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL		REGIONAL		
		KHLS RPJMD	KLHS RTRW		RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJM NASIONAL TAHUN 2025-2029	RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN PPU TAHUN 2025-2029	RTRW KABUPATEN PPU TAHUN 2013-2033	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)		(7)
Sebagian penanganan Infrastruktur menjadi rencana prioritas regional maupun nasional dengan adanya Kawasan Strategis	Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur	1. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi 2. Masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dan sanitasi	1. Belum optimalnya penanggulangan bencana berupa banjir 2. Masih minimnya penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah dan air bersih, serta sarana dan prasarana dasar permukiman layak	Urbanisasi Dunia yang Meningkat	1. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global: Penguatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Konektivitas Darat, Laut, dan Udara 2. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi [Pembangunan Air Minum Siap Konsumsi; Pengelolaan Sampah dan Limbah]	**Asta Cita 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	1. Pengoptimalan Integrasi dan Intervensi Penyediaan Perumahan: dengan Peningkatan Akses Tranportasi 2. Pengoptimalan Integrasi dan Intervensi Penyediaan Perumahan: dengan Infrastruktur Dasar	**Kegiatan Prioritas Utama Asta Cita 6:** 1. Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU 2.Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa.	Pemertaaan Infrastruktur dan Konektivitas melalui: (1) Jaringan jalan; (2) Sarana-prasarana sumber daya air; (3) Pengelolaan persampahan dan limbah; serta (4) Pengembangan jaringan drainase.	**Belum Optimalnya Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH		ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH					ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL		REGIONAL		
		KHLS RPJMD	KLHS RTRW		RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJM NASIONAL TAHUN 2025-2029	RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN PPU TAHUN 2025-2029	RTRW KABUPATEN PPU TAHUN 2013-2033	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)		(7)
	Belum optimalnya kualitas penataan ruang	1. Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan RTRW 2. Kesenjangan antara pembangunan fisik dan daya dukung lingkungan	-	Demografi Global	Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi: Perwujudan Kota Layak Huni, Inklusif, dan Berbudaya	**Kegiatan Prioritas Utama Asta Cita 6:** Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan Ibu Kota Nusantara	Integrasi dan Sinergi Pembangunan dengan Ibu Kota Nusantara	-	

Sumber: Hasil Telaah, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra DPUPR

Tujuan dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didasari melalui sasaran yang terdapat pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 yang merupakan turunan dari visi, yaitu **"Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera, dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara".** Berikut merupakan detail turuan dari visi tersebut berdasarkan tujuan dan sasaran.

Tabel 3. 1
Rumusan Awal Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2029

Visi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029: **"Berkolabirasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara"**	
Tujuan RPJMD	**Sasaran RPJMD**
Tujuan 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Sasaran 1: Meningkatnya akses dan mutu pendidikan
	Sasaran 2: Derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat
	Sasaran 3: Meningkatnya kesetaraan gender
	Sasaran 4: Meningkatnya harmoni sosial budaya masyarakat
Tujuan 2: Ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan berkelanjutan	Sasaran 5: Meningkatnya pertubuhan ekonomi berbasis potensi daerah
	Sasaran 6: Menurunnya Kemiskinan
	Sasaran 7: Menurunnya pengangguran
	Sasaran 8: Meningkatnya ketahanan pangan
	Sasaran 9: Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas

Visi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029: **"Berkolabirasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara"**	
Tujuan RPJMD	**Sasaran RPJMD**
	Sasaran 10: Meningkatnua kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana
Tujuan 3: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Sasaran 11: Tata kelola pemerintah yang bersih dan kolaboratif
	Sasaran 12: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital

Sumber: Cascading Kinerja Dalam Rankhir RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung pencapaian tujuan 2 sasaran 9 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029. Berikut merupakan tujuan yang didapatkan berdasarkan turunan sasaran RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 Tujuan 1: Tercapainya infrastruktur yang merata dan berkualitas

3.1. Sasaran Renstra DPUPR

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Indikator kinerja sasaran adalah Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI), dengan target akhir periode mencapai 81,87.

Tabel 3. 2
Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Satuan
Tujuan 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang Unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks
Sasaran 1: Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun
	Harapan Lama Sekolah	Tahun
	Rapor Pendidikan	Skor

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Satuan
Sasaran 2: Derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat	Usia Harapan Hidup	Tahun
Sasaran 3: Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks
Sasaran 4: Meningkatnya harmoni sosial budaya masyarakat	Angka Konflik	Kasus
Tujuan 2: Ekonomi daerah yang Menyejahterakan, berkeadilan dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase
	Indeks Gini	Indeks
Sasaran 5: Meningkatnya pertubuhan ekonomi berbasis potensi daerah	Kontribusi PDRB sektor primer	Persentase
	Nilai Investasi	Nilai
Sasaran 6: Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persentase
Sasaran 7: Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase
Sasaran 8: Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks
Sasaran 9 : Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas	**Indeks Kualitas Pelayanan Infrastruktur**	**Indeks**
Sasaran 10: Meningkatnua kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks
	Indeks Risiko Bencana	Indeks
Tujuan 3: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks
Sasaran 11: Tata kelola pemerintah yang bersih dan kolaboratif	Nilai SAKIP	Nilai
	IPKD	Indeks
	SPI KPK	Indeks
Sasaran 12: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks Pemdi	Indeks

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

Berdasarkan isu strategis dinas dan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD serta norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), maka ditetapkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan

Ruang sebagaimana dimuat pada Tabel 3.3. Dalam mencapai tujuan dan sasaran dinas, maka telah dipilih strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan cara atau upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Lebih lanjut, arah kebijakan menjadi dasar untuk menentukan kinerja yang akan dihasilkan oleh dinas. Kinerja hasil (*outcome*) diwujudkan dalam bentuk program perangkat daerah yang dilengkapi dengan kegiatan dan subkegiatan. Nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan dalam dokumen ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025.

Isu strategis merupakan hal yang berdaya ungkit dan penting untuk dikedepankan dalam pelayanan perangkat daerah. Isu strategis untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 menjadi penentu perumusan sasaran strategis Renstra, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Isu Belum Optimalnya Akses dan Kualitas Infrastruktur Wilayah diterjemahkan ke dalam sasaran *Meningkatnya Akses dan kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian.*

Keberhasilan pencapaian Tujuan **Tercapainya infrastruktur yang merata dan berkualitas** diukur dengan indikator: Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 3. 3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Tercapainya infrastruktur yang merata dan berkualitas		**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur**	-	7,65	7,70	7,75	7,80	7,85	7,90	
Sasaran 9 RPJMD: Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas		Meningkatnya Akses dan kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian	Persentase Infrastruktur Dasar Wilayah yang Berada dalam Kondisi Layak	-	-	46,21	47,51	48,71	50,01	51,31	
			Persentase Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pengembangan Wilayah yang sesuai dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang	34,89	42,24	45,50	52,49	59,28	65,94	72,49	

Sumber: Hasil Perhitungan, 2025

3.2. Strategi Renstra DPUPR

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, di antaranya yaitu optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan, subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Strategi Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3. 4
Penahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan pondasi pembangunan wilayah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan SDM, serta penataan ruang adaptif dan berkelanjutan. Fokus pada penyusunan RTRW, peningkatan kapasitas SDM, dan pembangunan infrastruktur dasar.	Pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis nilai tambah yang didukung oleh SDM unggul dan tata kelola inklusif. Fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang untuk mendorong daya saing daerah.	Akselerasi transformasi ekonomi lokal melalui penguatan infrastruktur dasar, pengembangan kapasitas SDM, dan inovasi tata kelola pembangunan dan penataan ruang. Fokus pada penguatan kelembagaan dan efektivitas pelayanan publik.	Pemerataan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur dan tata ruang yang berkualitas, serta penguatan SDM yang berdaya saing dan tata kelola kolaboratif. Fokus pada konsolidasi pembangunan dan pemerataan hasilnya.	Perwujudan DPUPR PPU yang unggul dan berkontribusi dalam pembangunan PPU yang berkeadilan, sejahtera, dan berdaya saing sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara. Fokus pada pencapaian visi pembangunan jangka menengah dan kontribusi nyata terhadap pengembangan IKN.

Sumber: Penyusun, 2025

3.3. Arah Kebijakan DPUPR

Subbab ini memuat strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas PUPR Tahun 2025-2029. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan akan merumuskan

perencanaan yang komprehensif, sinkron, dan selaras dengan tujuan dan sasaran Renstra PD dalam mencapai tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Arah kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2025-2029 diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan RPD terkait infrastruktur. Arah kebijakan RPD tersebut disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3. 5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

OPERASIONALISASI NSPK (NORMA STANDAR PROSEDUR KRITERIA)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui penyediaan air siap minum jaringan perpipaan, peningkatan akses sanitasi, pengembangan dan peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM, peningkatan pengawasan kualitas air minum dan pemanfaatan IPTEK dalam pemenuhan akses air minum aman.	Pembangunan dan Perluasan SPAM untuk pemenuhan air minum yang aman	
Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.		Pembangunan toilet dan tangki septik yang sesuai dengan standar dalam pemenuhan sanitasi aman dan berkelanjutan	
Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.	Pemerataan kualitas jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan strategis Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah	Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten untuk meningkatkan kondisi kemantapan dan keselamatan lalu lintas	
Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.	Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja dilaksanakan melalui pelatihan *reskilling, upskilling* dan *newskilling* serta transisi *school-to-work*	Pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat dan sesuai kebutuhan pasar kerja	

OPERASIONALISASI NSPK (NORMA STANDAR PROSEDUR KRITERIA)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup	Penyelenggaraan penataan ruang berbasis aspek perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah	
Pengelolaan dan pengembangan sumber daya air di daerah kabupaten/kota	Meningkatkan sarana prasarana dan infrastruktur penunjang kawasan ekonomi terpadu	Pengelolaan irigasi dan saluran pembuang diarahkan sebagai bagian dari penyediaan infrastruktur dasar guna mendukung pelayanan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan	
Penyelenggaraan sistem drainase di daerah kabupaten/kota		Pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase untuk mendukung pengendalian banjir dan genangan	
Penyelenggaraan penataan bangunan gedung di daerah kabupaten/kota		Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung yang aman, fungsional, dan sesuai rencana tata ruang	
Penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota		Pengendalian pemanfaatan bangunan dan lingkungannya yang mendukung fungsi ruang dan kualitas lingkungan	
Penyelenggaraan dukungan penunjang urusan pemerintahan bidang PUPR di daerah kabupaten/kota	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN,	Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui penguatan kelembagaan, digitalisasi, dan tata	

OPERASIONALISASI NSPK (NORMA STANDAR PROSEDUR KRITERIA)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
	dan pengelolaan aset daerah	kelola pemerintahan yang baik	

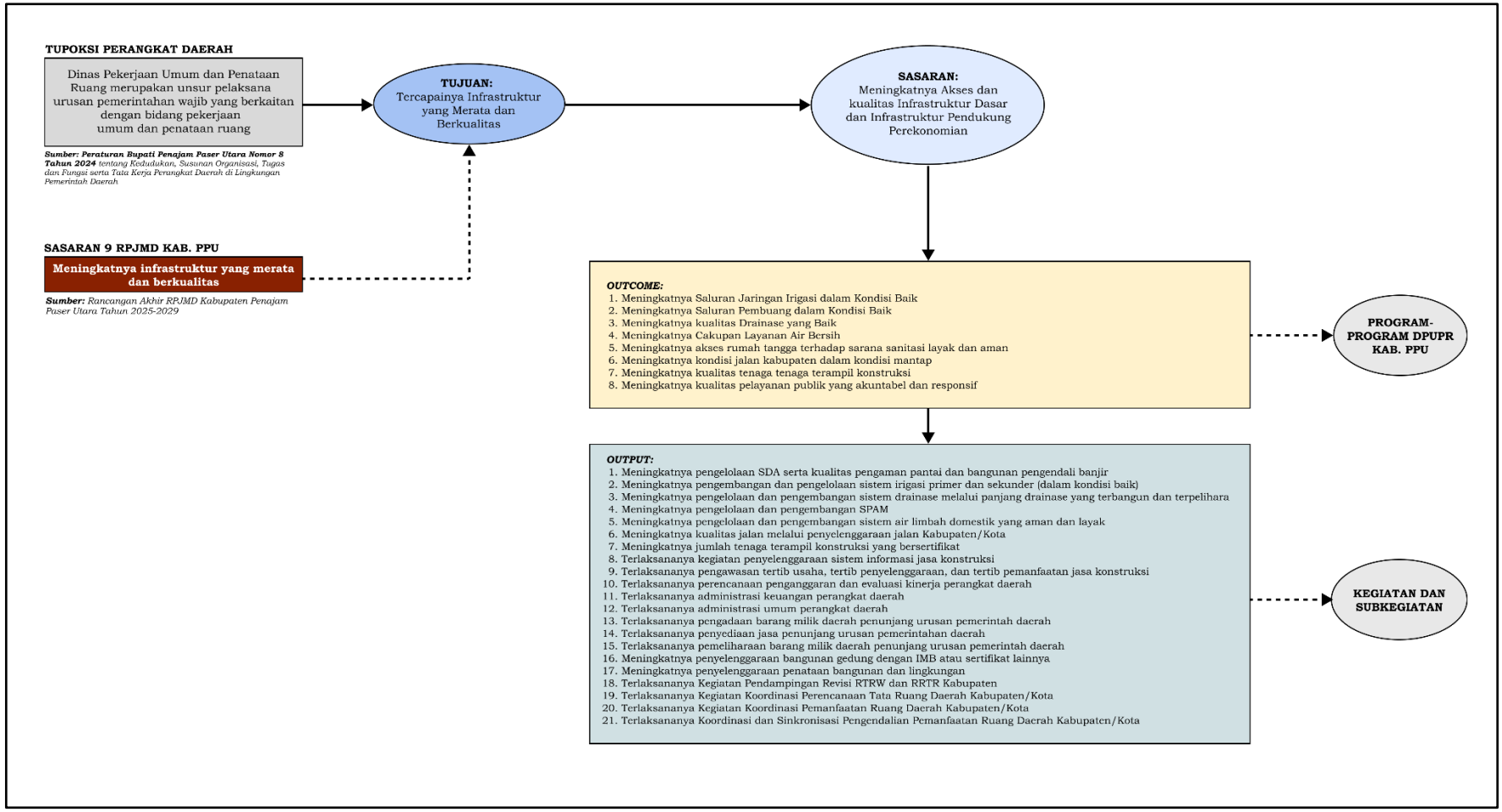
Sumber: Penyusun, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029, dilakukan dengan memperhatikan:

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan Tahun 2024;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/ subkegiatan sampai dengan Tahun 2024 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku; dan
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Gambar 4. 1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 (disesuaikan substansi dalam Renstra Kab. PPU Tahun 2025-2029)

4.1. Uraian Program Renstra DPUPR

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Setiap program harus selaras dengan visi dan misi daerah serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam pelaksanaannya, program harus berbasis pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Evaluasi program dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa target kinerja yang direncanakan dapat tercapai secara optimal.

Perumusan program dalam dokumen rencana strategis disusun berdasarkan isu strategis perangkat daerah. Berdasarkan kondisi tersebut tersusunlah 10 (sepuluh) program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penajam Paser Utara 2025-2029 sebagai berikut.

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
5. Program Penyelenggaraan Jalan;
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Program Penataan Bangunan Gedung;
9. Program Penatan Bangunan dan Lingkungannya;
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Dalam pelaksanaannya, setiap program harus mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, evaluasi rutin perlu dilakukan untuk memastikan pencapaian target kinerja secara optimal.

4.2. Uraian Kegiatan Renstra DPUPR

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Kegiatan disusun secara sistematis berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan ketersediaan sumber daya. Setiap kegiatan harus memiliki indikator kinerja yang jelas agar dapat diukur pencapaiannya secara efektif. Selain itu, kegiatan harus mampu mendorong tercapainya tujuan program secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan kualitas dan ketepatan pelaksanaannya.

Tabel 4. 1
Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

PROGRAM	KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah KewenanganPerangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

PROGRAM	KEGIATAN
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota
	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Penyusun, 2025

Selain itu, setiap kegiatan disusun agar selaras dan berkelanjutan dengan program yang dijalankan. Pelaksanaan kegiatan akan dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan mutu, ketepatan sasaran, serta efektivitas pelaksanaannya.

4.3. Uraian SubKegiatan Renstra DPUPR

Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Nomenklatur dan indikator dari SubKegiatan menyesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan DPUPR tahun 2025 sampai dengan 2029 disajikan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4. 2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
	Tujuan : Tercapaianya infrastruktur yang merata dan berkualitas				**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur**			**IKU Bupati**
		Sasaran 1: Meningkatnya Akses dan kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian			**Persentase infrastruktur dasar wilayah yang berada dalam kondisi Layak**			**IKU Kadis**
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan responsif		**Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)**	**1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.03.2.11.1.04.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)			
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)**	**1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
Sasaran RPJMD: Meningkatnya infrastruktur yang merata dan berkualitas				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
				Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)**	**1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
				Terlaksananya paket kegiatan adminitrasi umum perangkat daerah	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)**	**1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
				Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)**	**1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)			
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar		
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel		
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)**	**1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
				Terpeliharanya barang milik daerah	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)**	**1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan responsif		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)**	**1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.03.2.11.1.04.03.0003 - UPT PU Kecamatan Babulu**	
				Terlaksananya paket kegiatan administrasi umum perangkat daerah	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)**	**1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)**	**1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
				Terpeliharanya barang milik daerah	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)**	**1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)			
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan responsif		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)**	**1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.03.2.11.1.04.03.0004 - UPT PU Kecamatan Sepaku**	
				Terlaksananya paket kegiatan administrasi umum perangkat daerah	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)**	**1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)**	**1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
				Terpeliharanya barang milik daerah	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)**	**1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)			
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan responsif		**Persentase pelayanan Uji Lab terhadap permintaan konsumen (%)**	**1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
				Tersedianya hasil uji laboratorium atas permintaan konsumen	**Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)**	**1.03.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
				Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)**	**1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.03.2.11.1.04.03.0005 - UPT LAB dan Alat Berat**	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
				Terlaksananya paket kegiatan administrasi umum perangkat daerah	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)**	**1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)**	**1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
				Terpeliharanya barang milik daerah	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)**	**1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.03.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan responsif		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)**	**1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.03.2.11.1.04.03.0006 - UPT PU Kecamatan Penajam**	
				Terlaksananya paket kegiatan administrasi umum perangkat daerah	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)**	**1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)**	**1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
				Terpeliharanya barang milik daerah	**Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)**	**1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
						Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan responsif		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)**	**1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.03.2.11.1.04.03.0007 - UPT PU Kecamatan Waru**	
				Terlaksananya paket kegiatan administrasi umum perangkat daerah	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)**	**1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)**	**1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
				Terpeliharanya barang milik daerah	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)**	**1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)			
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
			Meningkatnya Saluran Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)		**Persentase Saluran Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%) (%)**	**1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**1.03.2.11.1.04.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
				Meningkatnya Panjang saluran Irigasi dalam kondisi baik	**Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)**	**1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)			
					Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM)			
					Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)			
					Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)			
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)			
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)			
				Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		
				Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.02.0004 - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa		
				Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		
				Meningkatnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.02.0010 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa		
				Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		
				Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa		
				Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		
			Meningkatnya Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)		**Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)**	**1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**1.03.2.11.1.04.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
				Meningkatnya Kualitas bangunan pengendali banjir	**Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)**	**1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		
					Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
					Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (Unit)			
					Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)			
					Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (KM)			
					Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)			
					Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM)			
					Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan (KM)			
					Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)			
					Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)			
					Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)			
					Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)			
					Jumlah Bendungan yang Dibangun (Bendungan)			
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)			
					Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)			
					Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)			
				Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai		
				Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
				Beroperasi dan Terpeliharanya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.01.0081 - Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir		
				Meningkatnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.01.0099 - Peningkatan Kanal Banjir		
				Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.01.0105 - Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		
				Terbangunnya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun (Bendungan)	1.03.02.2.01.0111 - Pembangunan Bendungan		
				Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.01.0113 - Pembangunan Kanal Banjir		
				Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tanggul Sungai		
				Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)	1.03.02.2.01.0119 - Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku		
				Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya		
				Terehabilitasinya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.01.0122 - Rehabilitasi Kanal Banjir		
				Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01.0124 - Pembangunan Polder/Kolam Retensi		
				Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01.0125 - Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		
				Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		
				Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung		
			Meningkatnya Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)		**Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)**	**1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		
				Meningkatnya Kualitas bangunan pengendali banjir	**Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)**	**1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1.03.2.11.1.04.03.0004 - UPT PU Kecamatan Sepaku**	
				Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung		
			Meningkatnya Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)		**Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)**	**1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**1.03.2.11.1.04.03.0007 - UPT PU Kecamatan Waru**	
				Meningkatnya Kualitas bangunan pengendali banjir	**Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)**	**1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada**		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
						Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
				Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung		
			Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum		**Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)**	**1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**1.03.2.11.1.04.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
					Kapasitas air baku (m3/detik)			
					Persentase Cakupan Layanan Air Minum Aman Perpipaan (%)			
				Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga terlayani air bersih	**Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)**	**1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**		
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)			
				Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
				Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
				Meningkatnya Jaringan Pipa yang terpasang	**Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)**	**1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**		
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)			
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
				Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
			Meningkatnya Akses Rumah Tangga Terhadap Sarana Sanitasi Layak dan Aman		**Persentase rumah tangga sanitasi layak (%)**	**1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**1.03.2.11.1.04.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
					Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
				Meningkatnya Jumlah Rumah tangga sanitasi aman	**Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)**	**1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
				Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja		
				Meningkatnya Jumlah Rumah tangga sanitasi Layak	**Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)**	**1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)			
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)			
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
				Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat		
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
			Meningkatnya kualitas Drainase yang Baik		**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)**	**1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**1.03.2.11.1.04.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
				Meningkatnya Panjang drainase yang terbangun dan terpelihara	**Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)**	**1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang**		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	**Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
				Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		
			Meningkatnya kualitas Drainase yang Baik		**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)**	**1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**1.03.2.11.1.04.03.0003 - UPT PU Kecamatan Babulu**	
				Meningkatnya Panjang drainase yang terbangun dan terpelihara	**Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)**	**1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan		
			Meningkatnya kualitas Drainase yang Baik		**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)**	**1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**1.03.2.11.1.04.03.0004 - UPT PU Kecamatan Sepaku**	
				Meningkatnya Panjang drainase yang terbangun dan terpelihara	**Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)**	**1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan		
			Meningkatnya kualitas Drainase yang Baik		**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)**	**1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**1.03.2.11.1.04.03.0006 - UPT PU Kecamatan Penajam**	
				Meningkatnya Panjang drainase yang terbangun dan terpelihara	**Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)**	**1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan		
			Meningkatnya kualitas Drainase yang Baik		**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)**	**1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**1.03.2.11.1.04.03.0007 - UPT PU Kecamatan Waru**	
				Meningkatnya Panjang drainase yang terbangun dan terpelihara	**Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)**	**1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan		
			Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap		**Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)**	**1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**1.03.2.11.1.04.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
				Meningkatnya Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	**Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)**	**1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**		
					Panjang jembatan yang dibangun (Meter)			
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)			
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)			
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)			
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)			
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)			
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)			
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)			
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		
				Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan		
				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan		
				Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan		
				Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan		
				Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
				Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan		
				Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan		
				Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan		
			Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap		**Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)**	**1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**1.03.2.11.1.04.03.0003 - UPT PU Kecamatan Babulu**	
				Meningkatnya Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	**Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)**	**1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**		
					Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)			
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)			
				Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan		
				Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan		
				Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan		
			Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap		**Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)**	**1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**1.03.2.11.1.04.03.0004 - UPT PU Kecamatan Sepaku**	
				Meningkatnya Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	**Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)**	**1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**		
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)			
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)			
				Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan		
				Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan		
				Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan		
			Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap		**Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)**	**1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**1.03.2.11.1.04.03.0006 - UPT PU Kecamatan Penajam**	
				Meningkatnya Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	**Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)**	**1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**		
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
				Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan		
				Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan		
			Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap		**Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)**	**1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**1.03.2.11.1.04.03.0007 - UPT PU Kecamatan Waru**	
				Meningkatnya Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	**Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)**	**1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**		
					Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)			
				Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan		
				Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan		
			Meningkatnya kualitas tenaga TenagaTrampil Konstruksi		**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil (%)**	**1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**1.03.2.11.1.04.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
				Meningkatnya Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat	**Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)**	**1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**		
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)			
				Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi		
				Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		
				Terlaksananya kegiatan bidang Jasa Konstruksi	**Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)**	**1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		
				Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	1.03.11.2.02.0012 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi		
				Terlaksananya pengawasan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang dilakukan	**Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)**	**1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)			
				Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota		
				Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi		
		Sasaran 2: Meningkatnya Akses dan kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian			**Persentase Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pengembangan Wilayah yang sesuai dengan Penyelenggaran Penataan Ruang**			**IKU Kadis**
			Tersedianya bangunan pemerintah yang memadai untuk mendukung pelayanan publik dan operasional pemerintahan		**Persentase jumlah bangunan pemerintah yang terbangun (%)**	**1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		
				Meningkatnya jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang terbangun	**Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)**	**1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**1.03.2.11.1.04.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			
					Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)			
				Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
				Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
				Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
			Terwujudnya penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, aman, dan fungsional		**Persentase bangunan yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF (%)**	**1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		
				meningkatnya Jumlah Komulatif Bangunan Gedung yang ber PBG	**Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)**	**1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**		
				Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		
			Meningkatnya pemenuhan Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan		**Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan (%)**	**1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**1.03.2.11.1.04.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
				Terbangunnya Fasilitas Pendukung Sarana dan Prasarana kawasan	**Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)**	**1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**		
					Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)			
				Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan	1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
				Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota		
			Meningkatnya pemenuhan Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan		**Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan (%)**	**1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**		
				Terbangunnya Fasilitas Pendukung Sarana dan Prasarana kawasan	**Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)**	**1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.03.2.11.1.04.03.0003 - UPT PU Kecamatan Babulu**	
				Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota		
			Meningkatnya pemenuhan Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan		**Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan (%)**	**1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**		
				Terbangunnya Fasilitas Pendukung Sarana dan Prasarana kawasan	**Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)**	**1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.03.2.11.1.04.03.0004 - UPT PU Kecamatan Sepaku**	
				Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota		
			Meningkatnya pemenuhan Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan		**Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan (%)**	**1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**		
				Terbangunnya Fasilitas Pendukung Sarana dan Prasarana kawasan	**Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)**	**1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.03.2.11.1.04.03.0006 - UPT PU Kecamatan Penajam**	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
				Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota		
			Meningkatnya pemenuhan Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan		**Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan (%)**	**1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**1.03.2.11.1.04.03.0007 - UPT PU Kecamatan Waru**	
				Terbangunnya Fasilitas Pendukung Sarana dan Prasarana kawasan	**Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)**	**1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**		
				Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota		
			Meningkatnya kualitas Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang		**Skoring Kinerja penyelenggaraan penataan ruang (Skor)**	**1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		
				Terlaksananya Kegiatan Pendampangan Revisi RTRW dan RRTR Kabupaten	**Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)**	**1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**1.03.2.11.1.04.03.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
					Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)			
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)			
					Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)			
					Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)			
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)			
					Dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)			
				Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		
				Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
				masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi				
				Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang		
				Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota		
				Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota		
				Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang		
				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)**	**1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		
					Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)			
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)			
				Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	1.03.12.2.02.0006 - Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang		
				Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		
				Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)**	**1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		
					Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)			
					Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(6)	(7)		(8)
				Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		
				Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		
				Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)**	**1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)			
					Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)			
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)			
					Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)			
					Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)			
				Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		
				Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang		
				Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR		
				Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK		
				Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		
				Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan RTR		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Tabel 4. 3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**179.859.287.832,00**		**213.991.568.794,00**		**234.199.024.522,00**		**254.734.163.274,00**		**236.673.198.903,00**	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**30.773.370.633,65**		**31.410.266.573,22**		**33.599.935.229,87**		**36.241.887.946,63**		**36.631.735.230,23**	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan responsif	**Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)**	**89,75**	**89,77**	**30.773.370.633,65**	**89,78**	**31.410.266.573,22**	**89,79**	**33.599.935.229,87**	**89,8**	**36.241.887.946,63**	**89,81**	**36.631.735.230,23**	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	**82,51**	**85**		**85,30**		**85,60**		**86**		**86,30**		
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**117.019.749,00**		**83.811.072,00**		**136.685.893,00**		**155.372.840,00**		**144.406.088,00**	
tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)**	**2**	**10**	**117.019.749,00**	**10**	**83.811.072,00**	**10**	**136.685.893,00**	**10**	**155.372.840,00**	**10**	**144.406.088,00**	
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				117.019.749,00		83.811.072,00		136.685.893,00		155.372.840,00		144.406.088,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10	117.019.749,00	10	83.811.072,00	10	136.685.893,00	10	155.372.840,00	10	144.406.088,00	
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**18.193.338.740,00**		**19.103.005.677,00**		**20.058.155.961,00**		**21.061.063.759,00**		**22.114.116.947,00**	
Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)**	**82**	**116**	**18.193.338.740,00**	**116**	**19.103.005.677,00**	**116**	**20.058.155.961,00**	**116**	**21.061.063.759,00**	**116**	**22.114.116.947,00**	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				16.215.338.740,00		17.026.105.677,00		17.877.410.961,00		18.771.281.509,00		19.709.845.584,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	82	116	16.215.338.740,00	116	17.026.105.677,00	116	17.877.410.961,00	116	18.771.281.509,00	116	19.709.845.584,00	
1.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.978.000.000,00		2.076.900.000,00		2.180.745.000,00		2.289.782.250,00		2.404.271.363,00	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	1.978.000.000,00	12	2.076.900.000,00	12	2.180.745.000,00	12	2.289.782.250,00	12	2.404.271.363,00	
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				**314.775.682,00**		**234.100.226,00**		**381.789.633,00**		**433.985.822,00**		**403.353.603,00**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya paket kegiatan adminitrasi umum perangkat daerah	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)**	**6**	**15**	**314.775.682,00**	**10**	**234.100.226,00**	**15**	**381.789.633,00**	**15**	**433.985.822,00**	**15**	**403.353.603,00**	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	**352**	**60**		**60**		**60**		**60**		**60**		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	**6**	**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	**1**	**2**		**2**		**1**		**2**		**2**		
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.227.676,00		5.176.556,00		8.442.347,00		9.596.538,00		8.919.182,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	7.227.676,00	2	5.176.556,00	1	8.442.347,00	2	9.596.538,00	2	8.919.182,00	
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				186.288.152,00		133.422.007,00		217.595.429,00		247.343.885,00		229.885.499,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	15	186.288.152,00	10	133.422.007,00	15	217.595.429,00	15	247.343.885,00	15	229.885.499,00	
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.683.091,00		19.886.207,00		32.432.039,00		36.865.970,00		34.263.842,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	5	15.683.091,00	5	19.886.207,00	5	32.432.039,00	5	36.865.970,00	5	34.263.842,00	
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				105.576.763,00		75.615.456,00		123.319.818,00		140.179.429,00		130.285.080,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	352	60	105.576.763,00	60	75.615.456,00	60	123.319.818,00	60	140.179.429,00	60	130.285.080,00	
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**751.242.977,00**		**188.459.430,00**		**42.173.202,00**		**47.938.891,00**		**44.555.198,00**	
Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)**	**0**	**10**	**751.242.977,00**	**5**	**188.459.430,00**	**5**	**42.173.202,00**	**5**	**47.938.891,00**	**5**	**44.555.198,00**	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	**0**	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	**0**	**1**		**1**		**0**		**0**		**0**		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	**9**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Lainnya yang Disediakan (Unit)												
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	**0**	**1**		**0**		**0**		**0**		**0**		
1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				238.379.196,00		162.600.278,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	238.379.196,00	1	162.600.278,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				476.758.391,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0	1	476.758.391,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				7.299.171,00		5.227.762,00		8.525.858,00		9.691.466,00		9.007.409,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	7.299.171,00	5	5.227.762,00	5	8.525.858,00	5	9.691.466,00	5	9.007.409,00	
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.806.219,00		20.631.390,00		33.647.344,00		38.247.425,00		35.547.789,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	28.806.219,00	3	20.631.390,00	3	33.647.344,00	3	38.247.425,00	3	35.547.789,00	
1.03.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**8.591.471.618,00**		**8.893.765.022,00**		**9.497.096.270,00**		**10.010.574.243,00**		**10.450.051.631,00**	
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)**	**111**	**36**	**8.591.471.618,00**	**36**	**8.893.765.022,00**	**36**	**9.497.096.270,00**	**36**	**10.010.574.243,00**	**36**	**10.450.051.631,00**	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	**8**	**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				360.610.464,00		258.273.923,00		421.214.059,00		478.800.138,00		445.004.771,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	111	36	360.610.464,00	36	258.273.923,00	36	421.214.059,00	36	478.800.138,00	36	445.004.771,00	
1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.711.154,00		14.833.599,00		24.191.836,00		27.499.211,00		25.558.222,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	4	20.711.154,00	4	14.833.599,00	4	24.191.836,00	4	27.499.211,00	4	25.558.222,00	
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				8.210.150.000,00		8.620.657.500,00		9.051.690.375,00		9.504.274.894,00		9.979.488.638,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	8.210.150.000,00	12	8.620.657.500,00	12	9.051.690.375,00	12	9.504.274.894,00	12	9.979.488.638,00	
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**400.561.272,65**		**286.887.609,22**		**467.878.850,87**		**531.844.453,63**		**494.305.158,23**	
Terpeliharanya barang milik daerah	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)**	**155**	**121**	**400.561.272,65**	**122**	**286.887.609,22**	**122**	**467.878.850,87**	**122**	**531.844.453,63**	**122**	**494.305.158,23**	
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	**19**	**36**		**36**		**36**		**36**		**36**		
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				368.608.925,65		264.002.921,22		430.556.644,87		489.419.760,63		454.874.946,23	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	155	121	368.608.925,65	122	264.002.921,22	122	430.556.644,87	122	489.419.760,63	122	454.874.946,23	
1.03.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				31.952.347,00		22.884.688,00		37.322.206,00		42.424.693,00		39.430.212,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19	36	31.952.347,00	36	22.884.688,00	36	37.322.206,00	36	42.424.693,00	36	39.430.212,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan responsif	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)**	**82,81**	**83**	**30.773.370.633,65**	**83,1**	**31.410.266.573,22**	**83,2**	**33.599.935.229,87**	**83,3**	**36.241.887.946,63**	**83,4**	**36.631.735.230,23**	
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				**69.152.295,00**		**51.056.487,00**		**79.807.070,00**		**90.225.716,00**		**80.348.094,00**	
Terlaksananya paket kegiatan administrasi umum perangkat daerah	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)**	**66**	**20**	**69.152.295,00**	**20**	**51.056.487,00**	**20**	**79.807.070,00**	**20**	**90.225.716,00**	**20**	**80.348.094,00**	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	**1**	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	**1**	**6**		**6**		**6**		**6**		**6**		
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.732.910,00		35.772.061,00		55.561.884,00		62.884.590,00		55.662.836,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6	49.732.910,00	6	35.772.061,00	6	55.561.884,00	6	62.884.590,00	6	55.662.836,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.856.260,00		2.276.404,00		4.040.864,00		4.374.580,00		4.356.222,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	3	2.856.260,00	3	2.276.404,00	3	4.040.864,00	3	4.374.580,00	3	4.356.222,00	
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.563.125,00		13.008.022,00		20.204.322,00		22.966.546,00		20.329.036,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	66	20	16.563.125,00	20	13.008.022,00	20	20.204.322,00	20	22.966.546,00	20	20.329.036,00	
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**4.004.770,00**		**2.868.269,00**		**4.677.806,00**		**5.317.330,00**		**4.942.014,00**	
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)**	**12**	**12**	**4.004.770,00**	**12**	**2.868.269,00**	**12**	**4.677.806,00**	**12**	**5.317.330,00**	**12**	**4.942.014,00**	
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4.004.770,00		2.868.269,00		4.677.806,00		5.317.330,00		4.942.014,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	4.004.770,00	12	2.868.269,00	12	4.677.806,00	12	5.317.330,00	12	4.942.014,00	
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**234.381.005,00**		**247.477.624,00**		**388.933.190,00**		**431.989.790,00**		**392.059.977,00**	
Terpeliharanya barang milik daerah	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)**	**11**	**11**	**234.381.005,00**	**11**	**247.477.624,00**	**11**	**388.933.190,00**	**11**	**431.989.790,00**	**11**	**392.059.977,00**	
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	**6**	**6**		**6**		**6**		**6**		**6**		
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				85.368.358,00		60.162.103,00		95.970.527,00		109.364.504,00		101.645.179,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	11	85.368.358,00	11	60.162.103,00	11	95.970.527,00	11	109.364.504,00	11	101.645.179,00	
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				149.012.647,00		187.315.521,00		292.962.663,00		322.625.286,00		290.414.798,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	6	6	149.012.647,00	6	187.315.521,00	6	292.962.663,00	6	322.625.286,00	6	290.414.798,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan responsif	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)**	**84,6**	**86**	**30.773.370.633,65**	**86**	**31.410.266.573,22**	**86**	**33.599.935.229,87**	**86**	**36.241.887.946,63**	**86**	**36.631.735.230,23**	
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				**90.115.422,00**		**116.204.385,00**		**141.859.095,00**		**165.708.140,00**		**152.486.389,00**	
Terlaksananya paket kegiatan administrasi umum perangkat daerah	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)**	**1**	**4**	**90.115.422,00**	**4**	**116.204.385,00**	**4**	**141.859.095,00**	**4**	**165.708.140,00**	**4**	**152.486.389,00**	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	**69**	**30**		**45**		**45**		**50**		**50**		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	**1**	**4**		**6**		**5**		**5**		**5**		
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				64.951.791,00		89.711.690,00		98.828.944,00		112.340.297,00		104.410.930,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	64.951.791,00	6	89.711.690,00	5	98.828.944,00	5	112.340.297,00	5	104.410.930,00	
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.467.549,00		3.199.717,00		5.206.525,00		5.892.712,00		5.352.054,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4	4.467.549,00	4	3.199.717,00	4	5.206.525,00	4	5.892.712,00	4	5.352.054,00	
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.696.082,00		23.292.978,00		37.823.626,00		47.475.131,00		42.723.405,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	69	30	20.696.082,00	45	23.292.978,00	45	37.823.626,00	50	47.475.131,00	50	42.723.405,00	
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**6.333.831,00**		**5.184.425,00**		**8.857.809,00**		**10.548.267,00**		**10.270.578,00**	
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)**	**24**	**24**	**6.333.831,00**	**24**	**5.184.425,00**	**24**	**8.857.809,00**	**24**	**10.548.267,00**	**24**	**10.270.578,00**	
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.333.831,00		5.184.425,00		8.857.809,00		10.548.267,00		10.270.578,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	24	6.333.831,00	24	5.184.425,00	24	8.857.809,00	24	10.548.267,00	24	10.270.578,00	
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**297.292.637,00**		**938.976.525,00**		**346.467.717,00**		**1.082.624.422,00**		**356.088.647,00**	
Terpeliharanya barang milik daerah	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara**	**11**	**10**	**297.292.637,00**	**10**	**938.976.525,00**	**10**	**346.467.717,00**	**10**	**1.082.624.422,00**	**10**	**356.088.647,00**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)												
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	**8**	**8**		**8**		**8**		**8**		**10**		
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				36.067.023,00		239.692.453,00		42.032.858,00		47.572.523,00		43.940.064,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	10	36.067.023,00	10	239.692.453,00	10	42.032.858,00	10	47.572.523,00	10	43.940.064,00	
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				261.225.614,00		699.284.072,00		304.434.859,00		1.035.051.899,00		312.148.583,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	8	8	261.225.614,00	8	699.284.072,00	8	304.434.859,00	8	1.035.051.899,00	10	312.148.583,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan responsif	**Persentase pelayanan Uji Lab terhadap permintaan konsumen (%)**	**100**	**100**	**30.773.370.633,65**	**100**	**31.410.266.573,22**	**100**	**33.599.935.229,87**	**100**	**36.241.887.946,63**	**100**	**36.631.735.230,23**	
1.03.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				**353.795.251,00**		**277.396.075,00**		**482.378.178,00**		**522.215.505,00**		**462.243.553,00**	
Tersedianya hasil uji laboratorium atas permintaan konsumen	**Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)**	**393**	**12**	**353.795.251,00**	**12**	**277.396.075,00**	**12**	**482.378.178,00**	**12**	**522.215.505,00**	**12**	**462.243.553,00**	
1.03.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				353.795.251,00		277.396.075,00		482.378.178,00		522.215.505,00		462.243.553,00	
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	393	12	353.795.251,00	12	277.396.075,00	12	482.378.178,00	12	522.215.505,00	12	462.243.553,00	
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**30.989.295,00**		**21.138.036,00**		**32.832.023,00**		**35.543.464,00**		**31.461.603,00**	
Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)**	**70**	**20**	**30.989.295,00**	**20**	**21.138.036,00**	**20**	**32.832.023,00**	**20**	**35.543.464,00**	**20**	**31.461.603,00**	
1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.989.295,00		21.138.036,00		32.832.023,00		35.543.464,00		31.461.603,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	70	20	30.989.295,00	20	21.138.036,00	20	32.832.023,00	20	35.543.464,00	20	31.461.603,00	
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				**117.718.799,00**		**80.947.297,00**		**125.728.967,00**		**136.112.327,00**		**120.480.999,00**	
Terlaksananya paket kegiatan administrasi umum perangkat daerah	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan**	**20**	**15**	**117.718.799,00**	**15**	**80.947.297,00**	**15**	**125.728.967,00**	**15**	**136.112.327,00**	**15**	**120.480.999,00**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Konsultasi SKPD (Laporan)												
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.767.584,00		3.902.407,00		6.061.296,00		6.561.870,00		5.808.296,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.767.584,00	1	3.902.407,00	1	6.061.296,00	1	6.561.870,00	1	5.808.296,00	
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				68.684.198,00		46.850.018,00		72.768.390,00		78.777.986,00		69.731.013,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	68.684.198,00	1	46.850.018,00	1	72.768.390,00	1	78.777.986,00	1	69.731.013,00	
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				44.267.017,00		30.194.872,00		46.899.281,00		50.772.471,00		44.941.690,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	15	44.267.017,00	15	30.194.872,00	15	46.899.281,00	15	50.772.471,00	15	44.941.690,00	
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**45.292.048,00**		**30.894.053,00**		**47.985.264,00**		**51.948.139,00**		**45.982.343,00**	
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)**	**4**	**12**	**45.292.048,00**	**12**	**30.894.053,00**	**12**	**47.985.264,00**	**12**	**51.948.139,00**	**12**	**45.982.343,00**	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	**12**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	**1**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				14.302.752,00		9.756.017,00		15.153.241,00		16.404.676,00		14.520.740,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	14.302.752,00	12	9.756.017,00	12	15.153.241,00	12	16.404.676,00	12	14.520.740,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.535.168,00		6.504.011,00		10.102.161,00		10.936.450,00		9.680.493,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	12	9.535.168,00	12	6.504.011,00	12	10.102.161,00	12	10.936.450,00	12	9.680.493,00	
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				21.454.128,00		14.634.025,00		22.729.862,00		24.607.013,00		21.781.110,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	12	21.454.128,00	12	14.634.025,00	12	22.729.862,00	12	24.607.013,00	12	21.781.110,00	
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**91.060.852,00**		**62.113.307,00**		**121.731.037,00**		**131.784.227,00**		**140.851.177,00**	
Terpeliharanya barang milik daerah	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)**	**6**	**5**	**91.060.852,00**	**5**	**62.113.307,00**	**5**	**121.731.037,00**	**5**	**131.784.227,00**	**5**	**140.851.177,00**	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	**0**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				38.140.671,00		26.016.045,00		40.408.643,00		43.745.801,00		38.721.973,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	5	38.140.671,00	5	26.016.045,00	5	40.408.643,00	5	43.745.801,00	5	38.721.973,00	
1.03.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				5.244.342,00		3.577.206,00		5.556.188,00		6.015.048,00		5.324.271,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	12	5.244.342,00	12	3.577.206,00	12	5.556.188,00	12	6.015.048,00	12	5.324.271,00	
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				47.675.839,00		32.520.056,00		75.766.206,00		82.023.378,00		96.804.933,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	47.675.839,00	1	32.520.056,00	1	75.766.206,00	1	82.023.378,00	1	96.804.933,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan responsif	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)**	**80,25**	**84,40**	**30.773.370.633,65**	**84,40**	**31.410.266.573,22**	**84,40**	**33.599.935.229,87**	**84,40**	**36.241.887.946,63**	**84,40**	**36.631.735.230,23**	
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				**42.228.359,00**		**28.528.209,00**		**44.310.588,00**		**47.969.990,00**		**42.461.048,00**	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	**17**	**10**	**42.228.359,00**	**10**	**28.528.209,00**	**10**	**44.310.588,00**	**10**	**47.969.990,00**	**10**	**42.461.048,00**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya paket kegiatan administrasi umum perangkat daerah	**Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)**												
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.100.250,00		16.578.334,00		25.749.802,00		27.876.356,00		24.674.996,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	17.100.250,00	1	16.578.334,00	1	25.749.802,00	1	27.876.356,00	1	24.674.996,00	
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				7.472.034,00		5.096.732,00		7.916.346,00		8.570.120,00		7.585.915,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	7.472.034,00	1	5.096.732,00	1	7.916.346,00	1	8.570.120,00	1	7.585.915,00	
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17.656.075,00		6.853.143,00		10.644.440,00		11.523.514,00		10.200.137,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	17	10	17.656.075,00	10	6.853.143,00	10	10.644.440,00	10	11.523.514,00	10	10.200.137,00	
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**3.077.952,00**		**2.099.495,00**		**3.260.978,00**		**3.530.286,00**		**3.124.863,00**	
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)**	**8**	**12**	**3.077.952,00**	**12**	**2.099.495,00**	**12**	**3.260.978,00**	**12**	**3.530.286,00**	**12**	**3.124.863,00**	
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.077.952,00		2.099.495,00		3.260.978,00		3.530.286,00		3.124.863,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8	12	3.077.952,00	12	2.099.495,00	12	3.260.978,00	12	3.530.286,00	12	3.124.863,00	
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**212.580.128,00**		**169.253.477,00**		**276.799.206,00**		**299.658.740,00**		**265.245.515,00**	
Terpeliharanya barang milik daerah	**Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)**	**9**	**12**	**212.580.128,00**	**12**	**169.253.477,00**	**12**	**276.799.206,00**	**12**	**299.658.740,00**	**12**	**265.245.515,00**	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	**15**	**5**		**11**		**11**		**11**		**11**		
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan				27.385.002,00		26.386.773,00		49.500.588,00		53.588.607,00		47.434.417,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	5	27.385.002,00	11	26.386.773,00	11	49.500.588,00	11	53.588.607,00	11	47.434.417,00	
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				185.195.126,00		142.866.704,00		227.298.618,00		246.070.133,00		217.811.098,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	9	12	185.195.126,00	12	142.866.704,00	12	227.298.618,00	12	246.070.133,00	12	217.811.098,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel dan responsif	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)**	**91,92**	**84,50**	**30.773.370.633,65**	**85**	**31.410.266.573,22**	**85,50**	**33.599.935.229,87**	**86**	**36.241.887.946,63**	**86,50**	**36.631.735.230,23**	
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				**94.126.560,00**		**66.666.114,00**		**103.547.149,00**		**112.098.617,00**		**99.225.056,00**	
Terlaksananya paket kegiatan administrasi umum perangkat daerah	**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)**	**1**	**5**	**94.126.560,00**	**5**	**66.666.114,00**	**5**	**103.547.149,00**	**5**	**112.098.617,00**	**5**	**99.225.056,00**	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	**1**	**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	**72**	**60**		**60**		**60**		**60**		**60**		
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.149.973,00		32.520.056,00		50.510.804,00		54.682.252,00		48.402.466,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	45.149.973,00	4	32.520.056,00	4	50.510.804,00	4	54.682.252,00	4	48.402.466,00	
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.885.210,00		4.878.008,00		7.576.621,00		8.202.338,00		7.260.370,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	5	6.885.210,00	5	4.878.008,00	5	7.576.621,00	5	8.202.338,00	5	7.260.370,00	
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				42.091.377,00		29.268.050,00		45.459.724,00		49.214.027,00		43.562.220,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	72	60	42.091.377,00	60	29.268.050,00	60	45.459.724,00	60	49.214.027,00	60	43.562.220,00	
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**3.303.035,00**		**2.365.676,00**		**3.858.137,00**		**4.385.600,00**		**4.076.050,00**	
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)**	**19**	**24**	**3.303.035,00**	**24**	**2.365.676,00**	**24**	**3.858.137,00**	**24**	**4.385.600,00**	**24**	**4.076.050,00**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.303.035,00		2.365.676,00		3.858.137,00		4.385.600,00		4.076.050,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	19	24	3.303.035,00	24	2.365.676,00	24	3.858.137,00	24	4.385.600,00	24	4.076.050,00	
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**709.508.356,00**		**517.068.083,00**		**803.121.206,00**		**869.447.378,00**		**769.598.699,00**	
Terpeliharanya barang milik daerah	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)**	**6**	**11**	**709.508.356,00**	**11**	**517.068.083,00**	**11**	**803.121.206,00**	**11**	**869.447.378,00**	**11**	**769.598.699,00**	
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	**5**	**6**		**6**		**6**		**6**		**6**		
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				87.983.356,00		78.780.083,00		95.766.206,00		97.023.378,00		87.603.699,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	11	87.983.356,00	11	78.780.083,00	11	95.766.206,00	11	97.023.378,00	11	87.603.699,00	
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				621.525.000,00		438.288.000,00		707.355.000,00		772.424.000,00		681.995.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	5	6	621.525.000,00	6	438.288.000,00	6	707.355.000,00	6	772.424.000,00	6	681.995.000,00	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				**16.390.323.554,25**		**66.903.704.060,28**		**37.241.916.404,22**		**40.332.750.141,14**		**35.700.881.241,34**	
Meningkatnya Saluran Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	**Persentase Saluran Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)**	**25,49**	**34,90**	**4.010.193.778,51**	**37,98**	**4.227.607.234,24**	**40,43**	**6.566.404.511,09**	**43,51**	**7.108.692.738,51**	**46,58**	**6.292.320.616,64**	
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				**4.010.193.778,51**		**4.227.607.234,24**		**6.566.404.511,09**		**7.108.692.738,51**		**6.292.320.616,64**	
Meningkatnya Panjang saluran Irigasi dalam kondisi baik	**Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)**	**20,6**	**2**	**4.010.193.778,51**	**5**	**4.227.607.234,24**	**10**	**6.566.404.511,09**	**10**	**7.108.692.738,51**	**10**	**6.292.320.616,64**	
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	**10**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM)	**1,07**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)	**0,15**	**0,20**		**1**		**1**		**1**		**1**		
	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	**0**	**0,20**		**0,20**		**0,20**		**0,20**		**0,20**		
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	**5,02**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	**0**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				953.516.783,00		650.401.113,00		1.010.216.079,00		1.093.645.037,00		968.049.326,00	
Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	10	1	953.516.783,00	1	650.401.113,00	1	1.010.216.079,00	1	1.093.645.037,00	1	968.049.326,00	
1.03.02.2.02.0004 - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa				500.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	0	0,20	500.000.000,00	0,20	300.000.000,00	0,20	500.000.000,00	0,20	500.000.000,00	0,20	500.000.000,00	
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				930.275.174,00		675.601.669,00		1.015.324.118,00		1.140.467.555,00		952.073.988,00	
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	5,02	1	930.275.174,00	1	675.601.669,00	1	1.015.324.118,00	1	1.140.467.555,00	1	952.073.988,00	
1.03.02.2.02.0010 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa				200.058.383,00		813.001.391,00		1.262.770.098,00		1.367.056.296,00		1.210.061.657,00	
Meningkatnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM)	1,07	1	200.058.383,00	1	813.001.391,00	1	1.262.770.098,00	1	1.367.056.296,00	1	1.210.061.657,00	
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				953.516.783,00		650.401.113,00		1.010.216.079,00		1.093.645.037,00		968.049.326,00	
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0	1	953.516.783,00	1	650.401.113,00	1	1.010.216.079,00	1	1.093.645.037,00	1	968.049.326,00	
1.03.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa				238.379.196,51		813.001.392,24		1.262.770.098,09		1.367.056.296,51		1.210.061.657,64	
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)	0,15	0,20	238.379.196,51	1	813.001.392,24	1	1.262.770.098,09	1	1.367.056.296,51	1	1.210.061.657,64	
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				234.447.459,00		325.200.556,00		505.108.039,00		546.822.517,00		484.024.662,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	20,6	2	234.447.459,00	5	325.200.556,00	10	505.108.039,00	10	546.822.517,00	10	484.024.662,00	
Meningkatnya Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)	**Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)**	**13,47**	**20,15**	**12.380.129.775,74**	**20,98**	**62.676.096.826,04**	**21,81**	**30.675.511.893,13**	**22,64**	**33.224.057.402,63**	**23,47**	**29.408.560.624,70**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				**12.331.345.871,74**		**62.633.627.178,04**		**30.609.547.182,13**		**33.137.444.611,63**		**29.331.894.566,70**	
Meningkatnya Kualitas bangunan pengendali banjir	**Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)**	**18**	**2**	**12.331.345.871,74**	**2**	**62.633.627.178,04**	**2**	**30.609.547.182,13**	**2**	**33.137.444.611,63**	**2**	**29.331.894.566,70**	
	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	**10**	**2**		**5**		**5**		**5**		**5**		
	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (Unit)	**0**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)	**0**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (KM)	**28**	**4**		**10**		**10**		**10**		**10**		
	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	**13**	**3**		**10**		**10**		**10**		**10**		
	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM)	**0**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan (KM)	**1**	**1**		**1**		**2**		**2**		**2**		
	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)	**0**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	**1**	**4**		**4**		**4**		**4**		**4**		
	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	**0**	**0**		**2**		**2**		**4**		**4**		
	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	**0**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
	Jumlah Bendungan yang Dibangun (Bendungan)	**0**	**0**		**1**		**0**		**0**		**0**		
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	**0**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	**0**	**5**		**10**		**10**		**10**		**10**		
	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	**10**	**1**		**0**		**0**		**0**		**0**		
1.03.02.2.01.0026 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				190.703.357,00		325.200.556,00		505.108.039,00		546.822.518,00		484.024.663,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	10	2	190.703.357,00	5	325.200.556,00	5	505.108.039,00	5	546.822.518,00	5	484.024.663,00	
1.03.02.2.01.0073 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai				219.703.978,00		325.200.556,00		505.108.039,00		546.822.518,00		484.024.663,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0	5	219.703.978,00	10	325.200.556,00	10	505.108.039,00	10	546.822.518,00	10	484.024.663,00	
1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				95.351.678,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	10	1	95.351.678,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.02.2.01.0081 - Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir				208.031.164,00		325.200.556,00		505.108.039,00		546.822.518,00		484.024.663,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	13	3	208.031.164,00	10	325.200.556,00	10	505.108.039,00	10	546.822.518,00	10	484.024.663,00	
1.03.02.2.01.0099 - Peningkatan Kanal Banjir				476.758.391,00		650.401.113,00		1.010.216.079,00		1.093.645.037,00		968.049.326,00	
Meningkatnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan (KM)	1	1	476.758.391,00	1	650.401.113,00	2	1.010.216.079,00	2	1.093.645.037,00	2	968.049.326,00	
1.03.02.2.01.0105 - Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya				953.516.783,00		650.401.113,00		1.010.216.079,00		1.093.645.037,00		968.049.326,00	
Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi (KM)	0	1	953.516.783,00	1	650.401.113,00	1	1.010.216.079,00	1	1.093.645.037,00	1	968.049.326,00	
1.03.02.2.01.0111 - Pembangunan Bendungan				0,00		48.780.083.472,00		0,00		0,00		0,00	
Terbangunnya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun (Bendungan)	0	0	0,00	1	48.780.083.472,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.02.2.01.0113 - Pembangunan Kanal Banjir				2.383.791.957,00		5.918.650.128,00		9.192.966.316,00		9.952.169.834,00		8.809.248.863,00	
Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (KM)	28	4	2.383.791.957,00	10	5.918.650.128,00	10	9.192.966.316,00	10	9.952.169.834,00	10	8.809.248.863,00	
1.03.02.2.01.0115 - Pembangunan Tanggul Sungai				3.919.419.537,74		3.252.005.957,04		5.051.081.001,13		5.468.225.687,63		4.840.247.558,70	
Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (KM)	0	1	3.919.419.537,74	1	3.252.005.957,04	1	5.051.081.001,13	1	5.468.225.687,63	1	4.840.247.558,70	
1.03.02.2.01.0119 - Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku				95.351.678,00		65.040.111,00		101.021.608,00		109.364.504,00		96.804.933,00	
Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)	0	1	95.351.678,00	1	65.040.111,00	1	101.021.608,00	1	109.364.504,00	1	96.804.933,00	
1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				476.758.391,00		325.200.556,00		505.108.039,00		546.822.518,00		484.024.663,00	
Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	1	4	476.758.391,00	4	325.200.556,00	4	505.108.039,00	4	546.822.518,00	4	484.024.663,00	
1.03.02.2.01.0122 - Rehabilitasi Kanal Banjir				953.516.783,00		650.401.113,00		1.010.216.079,00		1.093.645.037,00		968.049.326,00	
Terehabilitasinya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM)	0	1	953.516.783,00	1	650.401.113,00	1	1.010.216.079,00	1	1.093.645.037,00	1	968.049.326,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.02.2.01.0124 - Pembangunan Polder/Kolam Retensi				953.516.783,00		650.401.113,00		10.102.160.786,00		10.936.450.367,00		9.680.493.256,00	
Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (Unit)	0	1	953.516.783,00	1	650.401.113,00	1	10.102.160.786,00	1	10.936.450.367,00	1	9.680.493.256,00	
1.03.02.2.01.0125 - Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir				476.758.391,00		325.200.556,00		505.108.039,00		546.822.518,00		484.024.663,00	
Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (Unit)	18	2	476.758.391,00	2	325.200.556,00	2	505.108.039,00	2	546.822.518,00	2	484.024.663,00	
1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				928.167.000,00		227.640.000,00		101.021.000,00		109.364.000,00		96.804.000,00	
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	0	1	928.167.000,00	1	227.640.000,00	1	101.021.000,00	1	109.364.000,00	1	96.804.000,00	
1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung				0,00		162.600.278,00		505.108.039,00		546.822.518,00		484.024.663,00	
Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	2	162.600.278,00	2	505.108.039,00	4	546.822.518,00	4	484.024.663,00	
Meningkatnya Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)	**Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)**	**13,47**	**20,15**	**12.380.129.775,74**	**20,98**	**62.676.096.826,04**	**21,81**	**30.675.511.893,13**	**22,64**	**33.224.057.402,63**	**23,47**	**29.408.560.624,70**	
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				**13.252.751,00**		**18.079.606,00**		**28.081.608,00**		**45.601.102,00**		**40.364.208,00**	
Meningkatnya Kualitas bangunan pengendali banjir	**Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)**	**2**	**1**	**13.252.751,00**	**2**	**18.079.606,00**	**2**	**28.081.608,00**	**3**	**45.601.102,00**	**3**	**40.364.208,00**	
1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung				13.252.751,00		18.079.606,00		28.081.608,00		45.601.102,00		40.364.208,00	
Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	2	1	13.252.751,00	2	18.079.606,00	2	28.081.608,00	3	45.601.102,00	3	40.364.208,00	
Meningkatnya Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)	**Persentase Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)**	**13,47**	**20,15**	**12.380.129.775,74**	**20,98**	**62.676.096.826,04**	**21,81**	**30.675.511.893,13**	**22,64**	**33.224.057.402,63**	**23,47**	**29.408.560.624,70**	
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				**35.531.153,00**		**24.390.042,00**		**37.883.103,00**		**41.011.689,00**		**36.301.850,00**	
Meningkatnya Kualitas bangunan pengendali banjir	**Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)**	**1**	**2**	**35.531.153,00**	**2**	**24.390.042,00**	**2**	**37.883.103,00**	**2**	**41.011.689,00**	**2**	**36.301.850,00**	
1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung				35.531.153,00		24.390.042,00		37.883.103,00		41.011.689,00		36.301.850,00	
Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	1	2	35.531.153,00	2	24.390.042,00	2	37.883.103,00	2	41.011.689,00	2	36.301.850,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				**2.383.791.957,00**		**18.536.431.718,36**		**6.983.118.644,00**		**2.311.692.196,31**		**2.255.675.934,90**	
Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum	**Akses Rumah Tangga Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)**	**23,83**	**26,93**	**2.383.791.957,00**	**28,48**	**18.536.431.718,36**	**30,03**	**6.983.118.644,00**	**31,58**	**2.311.692.196,31**	**33,13**	**2.255.675.934,90**	
	Kapasitas air baku (m3/detik)	**390**	**396**		**398**		**400**		**402**		**404**		
	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Aman Perpipaan (%)	**24,44**	**26,93**		**28,48**		**30,03**		**31,58**		**33,13**		
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				**2.383.791.957,00**		**18.536.431.718,36**		**6.983.118.644,00**		**2.311.692.196,31**		**2.255.675.934,90**	
Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga terlayani air bersih	**Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)**	**0**	**0**	**953.516.783,00**	**10**	**17.398.229.772,00**	**0**	**5.051.080.393,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	**10**	**10**		**20**		**10**		**0**		**0**		
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				953.516.783,00		6.666.611.408,00		5.051.080.393,00		0,00		0,00	
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	10	10	953.516.783,00	20	6.666.611.408,00	10	5.051.080.393,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				0,00		10.731.618.364,00		0,00		0,00		0,00	
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	0	0	0,00	10	10.731.618.364,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Meningkatnya Jaringan Pipa yang terpasang	**Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)**	**1**	**9**	**1.430.275.174,00**	**1**	**1.138.201.946,36**	**1**	**1.932.038.251,00**	**1**	**2.311.692.196,31**	**1**	**2.255.675.934,90**	
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	**599**	**1.000**		**1.000**		**1.000**		**1.000**		**1.000**		
1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				238.379.196,00		243.900.417,36		404.086.433,00		492.140.267,31		484.024.663,90	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1	9	238.379.196,00	1	243.900.417,36	1	404.086.433,00	1	492.140.267,31	1	484.024.663,90	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1.191.895.978,00		894.301.529,00		1.527.951.818,00		1.819.551.929,00		1.771.651.271,00	
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	599	1.000	1.191.895.978,00	1.000	894.301.529,00	1.000	1.527.951.818,00	1.000	1.819.551.929,00	1.000	1.771.651.271,00	
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				**822.576.998,00**		**617.881.057,00**		**454.597.235,00**		**382.775.763,00**		**338.817.264,00**	
Meningkatnya Akses Rumah Tangga Terhadap Sarana Sanitasi Layak dan Aman	**Persentase rumah tangga sanitasi layak (%)**	**95,57**	**95,74**	**822.576.998,00**	**95,77**	**617.881.057,00**	**95,80**	**454.597.235,00**	**95,83**	**382.775.763,00**	**95,86**	**338.817.264,00**	
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	**0,09**	**51,75**		**51,78**		**51,81**		**51,84**		**51,87**		
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				**822.576.998,00**		**617.881.057,00**		**454.597.235,00**		**382.775.763,00**		**338.817.264,00**	
Meningkatnya Jumlah Rumah tangga sanitasi aman	**Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)**	**0**	**1**	**476.758.391,00**	**1**	**325.200.556,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja				476.758.391,00		325.200.556,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	0	1	476.758.391,00	1	325.200.556,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Meningkatnya Jumlah Rumah tangga sanitasi Layak	**Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)**	**0**	**1**	**345.818.607,00**	**1**	**292.680.501,00**	**1**	**454.597.235,00**	**1**	**382.775.763,00**	**1**	**338.817.264,00**	
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	**61.593**	**63.915**		**63.935**		**63.955**		**63.975**		**63.995**		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	**1**	**1**		**1**		**1**		**0**		**0**		
1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				95.351.679,00		65.040.112,00		101.021.607,00		109.364.504,00		96.804.933,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0	1	95.351.679,00	1	65.040.112,00	1	101.021.607,00	1	109.364.504,00	1	96.804.933,00	
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				238.379.196,00		162.600.278,00		252.554.020,00		273.411.259,00		242.012.331,00	
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	61.593	63.915	238.379.196,00	63.935	162.600.278,00	63.955	252.554.020,00	63.975	273.411.259,00	63.995	242.012.331,00	
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				12.087.732,00		65.040.111,00		101.021.608,00		0,00		0,00	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1	1	12.087.732,00	1	65.040.111,00	1	101.021.608,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				**4.909.838.652,62**		**3.360.375.310,00**		**5.234.901.873,87**		**5.676.277.521,47**		**5.034.876.918,10**	
Meningkatnya kualitas Drainase yang Baik	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)**	**40,66**	**42,27**	**4.909.838.652,62**	**42,61**	**3.360.375.310,00**	**42,95**	**5.234.901.873,87**	**43,29**	**5.676.277.521,47**	**43,63**	**5.034.876.918,10**	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				**4.767.583.915,62**		**3.252.005.565,00**		**5.051.080.393,87**		**5.468.225.184,47**		**4.840.246.629,10**	
Meningkatnya Panjang drainase yang terbangun dan terpelihara	**Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)**	**30**	**20**	**4.767.583.915,62**	**20**	**3.252.005.565,00**	**20**	**5.051.080.393,87**	**20**	**5.468.225.184,47**	**20**	**4.840.246.629,10**	
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	**0**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				4.667.583.915,62		3.152.005.565,00		4.951.080.393,87		5.368.225.184,47		4.740.246.629,10	
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	30	20	4.667.583.915,62	20	3.152.005.565,00	20	4.951.080.393,87	20	5.368.225.184,47	20	4.740.246.629,10	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Meningkatnya kualitas Drainase yang Baik	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)**	**40,66**	**42,27**	**4.909.838.652,62**	**42,61**	**3.360.375.310,00**	**42,95**	**5.234.901.873,87**	**43,29**	**5.676.277.521,47**	**43,63**	**5.034.876.918,10**	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				**57.967.354,00**		**40.650.070,00**		**63.138.505,00**		**71.086.927,00**		**62.923.206,00**	
Meningkatnya Panjang drainase yang terbangun dan terpelihara	**Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)**	**0**	**5.000**	**57.967.354,00**	**5.000**	**40.650.070,00**	**8.000**	**63.138.505,00**	**5.500**	**71.086.927,00**	**5.500**	**62.923.206,00**	
1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan				57.967.354,00		40.650.070,00		63.138.505,00		71.086.927,00		62.923.206,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	0	5.000	57.967.354,00	5.000	40.650.070,00	8.000	63.138.505,00	5.500	71.086.927,00	5.500	62.923.206,00	
Meningkatnya kualitas Drainase yang Baik	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)**	**40,66**	**42,27**	**4.909.838.652,62**	**42,61**	**3.360.375.310,00**	**42,95**	**5.234.901.873,87**	**43,29**	**5.676.277.521,47**	**43,63**	**5.034.876.918,10**	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				**14.805.436,00**		**16.663.188,00**		**36.077.379,00**		**39.056.839,00**		**38.892.935,00**	
Meningkatnya Panjang drainase yang terbangun dan terpelihara	**Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)**	**0**	**200**	**14.805.436,00**	**300**	**16.663.188,00**	**400**	**36.077.379,00**	**400**	**39.056.839,00**	**450**	**38.892.935,00**	
1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan				14.805.436,00		16.663.188,00		36.077.379,00		39.056.839,00		38.892.935,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	0	200	14.805.436,00	300	16.663.188,00	400	36.077.379,00	400	39.056.839,00	450	38.892.935,00	
Meningkatnya kualitas Drainase yang Baik	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)**	**40,66**	**42,27**	**4.909.838.652,62**	**42,61**	**3.360.375.310,00**	**42,95**	**5.234.901.873,87**	**43,29**	**5.676.277.521,47**	**43,63**	**5.034.876.918,10**	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				**44.780.123,00**		**34.146.058,00**		**58.339.979,00**		**69.473.801,00**		**67.644.867,00**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Panjang drainase yang terbangun dan terpelihara	**Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)**	**5.999**	**2.500**	**44.780.123,00**	**3.000**	**34.146.058,00**	**3.500**	**58.339.979,00**	**3.500**	**69.473.801,00**	**2.000**	**67.644.867,00**	
1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan				44.780.123,00		34.146.058,00		58.339.979,00		69.473.801,00		67.644.867,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	5.999	2.500	44.780.123,00	3.000	34.146.058,00	3.500	58.339.979,00	3.500	69.473.801,00	2.000	67.644.867,00	
Meningkatnya kualitas Drainase yang Baik	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)**	**40,66**	**42,27**	**4.909.838.652,62**	**42,61**	**3.360.375.310,00**	**42,95**	**5.234.901.873,87**	**43,29**	**5.676.277.521,47**	**43,63**	**5.034.876.918,10**	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				**24.701.824,00**		**16.910.429,00**		**26.265.617,00**		**28.434.770,00**		**25.169.281,00**	
Meningkatnya Panjang drainase yang terbangun dan terpelihara	**Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)**	**4.000**	**2.000**	**24.701.824,00**	**2.000**	**16.910.429,00**	**2.000**	**26.265.617,00**	**2.000**	**28.434.770,00**	**2.000**	**25.169.281,00**	
1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan				24.701.824,00		16.910.429,00		26.265.617,00		28.434.770,00		25.169.281,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	4.000	2.000	24.701.824,00	2.000	16.910.429,00	2.000	26.265.617,00	2.000	28.434.770,00	2.000	25.169.281,00	
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				**15.217.080.106,90**		**10.211.297.473,48**		**15.759.370.826,61**		**17.060.862.572,43**		**15.101.569.479,93**	
Tersedianya bangunan pemerintah yang memadai untuk mendukung pelayanan publik dan operasional pemerintahan	**Persentase jumlah bangunan pemerintah yang terbangun (%)**	**32,86**	**37,14**	**14.922.107.783,07**	**40,00**	**10.146.257.362,18**	**42,86**	**15.658.349.218,75**	**45,71**	**16.951.498.068,76**	**48,57**	**15.004.764.547,37**	
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				**15.217.080.106,90**		**10.211.297.473,48**		**15.759.370.826,61**		**17.060.862.572,43**		**15.101.569.479,93**	
meningkatnya jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang terbangun	**Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)**	**11**	**2**	**14.922.107.783,07**	**3**	**10.146.257.362,18**	**3**	**15.658.349.218,75**	**3**	**16.951.498.068,76**	**3**	**15.004.764.547,37**	
	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	**0**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)												
	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	**0**	**1**		**1**		**0**		**0**		**0**		
1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				334.052.852,07		325.200.557,18		505.108.039,75		546.822.518,76		484.024.662,37	
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	11	2	334.052.852,07	3	325.200.557,18	3	505.108.039,75	3	546.822.518,76	3	484.024.662,37	
1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				285.303.187,00		65.040.111,00		0,00		0,00		0,00	
Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	0	1	285.303.187,00	1	65.040.111,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				14.302.751.744,00		9.756.016.694,00		15.153.241.179,00		16.404.675.550,00		14.520.739.885,00	
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	14.302.751.744,00	2	9.756.016.694,00	2	15.153.241.179,00	2	16.404.675.550,00	2	14.520.739.885,00	
Terwujudnya penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, aman, dan fungsional	**Persentase bangunan yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF (%)**	**20,97**	**36,11**	**294.972.323,83**	**38,79**	**65.040.111,30**	**40,93**	**101.021.607,86**	**42,67**	**109.364.503,67**	**44,13**	**96.804.932,56**	
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				**15.217.080.106,90**		**10.211.297.473,48**		**15.759.370.826,61**		**17.060.862.572,43**		**15.101.569.479,93**	
meningkatnya Jumlah Komulatif Bangunan Gedung yang ber PBG	**Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis**	**25**	**30**	**294.972.323,83**	**30**	**65.040.111,30**	**30**	**101.021.607,86**	**30**	**109.364.503,67**	**30**	**96.804.932,56**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)												
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				294.972.323,83		65.040.111,30		101.021.607,86		109.364.503,67		96.804.932,56	
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	25	30	294.972.323,83	30	65.040.111,30	30	101.021.607,86	30	109.364.503,67	30	96.804.932,56	
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				**6.802.677.924,96**		**5.100.298.117,52**		**8.171.876.050,48**		**9.760.862.524,69**		**9.526.676.088,93**	
Meningkatnya pemenuhan Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan	**Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan (%)**	**-**	**20**	**6.802.677.924,96**	**40**	**5.100.298.117,52**	**60**	**8.171.876.050,48**	**80**	**9.760.862.524,69**	**100**	**9.526.676.088,93**	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				**6.717.525.735,96**		**5.007.763.370,52**		**8.000.355.725,48**		**9.527.173.904,69**		**9.276.366.061,93**	
Terbangunnya Fasilitas Pendukung Sarana dan Prasarana kawasan	**Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)**	**4**	**1**	**6.717.525.735,96**	**1**	**5.007.763.370,52**	**0**	**8.000.355.725,48**	**0**	**9.527.173.904,69**	**0**	**9.276.366.061,93**	
	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	**4**	**4**		**4**		**3**		**3**		**3**		
1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan				476.758.391,00		325.200.556,00		0,00		0,00		0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	1	476.758.391,00	1	325.200.556,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				6.240.767.344,96		4.682.562.814,52		8.000.355.725,48		9.527.173.904,69		9.276.366.061,93	
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	4	4	6.240.767.344,96	4	4.682.562.814,52	3	8.000.355.725,48	3	9.527.173.904,69	3	9.276.366.061,93	
Meningkatnya pemenuhan Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan	**Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan (%)**	**-**	**20**	**6.802.677.924,96**	**25**	**5.100.298.117,52**	**33**	**8.171.876.050,48**	**50**	**9.760.862.524,69**	**100**	**9.526.676.088,93**	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				**14.411.167,00**		**11.382.019,00**		**18.688.997,00**		**21.872.901,00**		**21.781.110,00**	
Terbangunnya Fasilitas Pendukung Sarana dan Prasarana kawasan	**Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)**	**0**	**1**	**14.411.167,00**	**1**	**11.382.019,00**	**1**	**18.688.997,00**	**1**	**21.872.901,00**	**1**	**21.781.110,00**	
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				14.411.167,00		11.382.019,00		18.688.997,00		21.872.901,00		21.781.110,00	
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	0	1	14.411.167,00	1	11.382.019,00	1	18.688.997,00	1	21.872.901,00	1	21.781.110,00	
Meningkatnya pemenuhan Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan	**Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan (%)**	**0**	**20**	**6.802.677.924,96**	**25**	**5.100.298.117,52**	**33**	**8.171.876.050,48**	**50**	**9.760.862.524,69**	**100**	**9.526.676.088,93**	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				**14.421.229,00**		**21.641.028,00**		**35.141.156,00**		**57.064.947,00**		**67.348.705,00**	
Terbangunnya Fasilitas Pendukung Sarana dan Prasarana kawasan	**Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)**	**0**	**1**	**14.421.229,00**	**2**	**21.641.028,00**	**2**	**35.141.156,00**	**3**	**57.064.947,00**	**4**	**67.348.705,00**	
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				14.421.229,00		21.641.028,00		35.141.156,00		57.064.947,00		67.348.705,00	
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan	0	1	14.421.229,00	2	21.641.028,00	2	35.141.156,00	3	57.064.947,00	4	67.348.705,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	bangunan dan lingkungan (Kawasan)												
Meningkatnya pemenuhan Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan	**Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan (%)**	**0**	**10**	**6.802.677.924,96**	**16**	**5.100.298.117,52**	**27**	**8.171.876.050,48**	**44**	**9.760.862.524,69**	**100**	**9.526.676.088,93**	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				**40.570.232,00**		**48.780.083,00**		**101.021.608,00**		**136.705.630,00**		**145.207.399,00**	
Terbangunnya Fasilitas Pendukung Sarana dan Prasarana kawasan	**Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)**	**1**	**1**	**40.570.232,00**	**1**	**48.780.083,00**	**1**	**101.021.608,00**	**1**	**136.705.630,00**	**1**	**145.207.399,00**	
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				40.570.232,00		48.780.083,00		101.021.608,00		136.705.630,00		145.207.399,00	
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1	1	40.570.232,00	1	48.780.083,00	1	101.021.608,00	1	136.705.630,00	1	145.207.399,00	
Meningkatnya pemenuhan Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan	**Persentase Jumlah Sarana - prasarana yang terbangun terhadap target pembangunan diseluruh kawasan (%)**	**0**	**20**	**6.802.677.924,96**	**25**	**5.100.298.117,52**	**33**	**8.171.876.050,48**	**50**	**9.760.862.524,69**	**100**	**9.526.676.088,93**	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				**15.749.561,00**		**10.731.617,00**		**16.668.564,00**		**18.045.142,00**		**15.972.813,00**	
Terbangunnya Fasilitas Pendukung Sarana dan Prasarana kawasan	**Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)**	**0**	**1**	**15.749.561,00**	**1**	**10.731.617,00**	**1**	**16.668.564,00**	**1**	**18.045.142,00**	**1**	**15.972.813,00**	
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				15.749.561,00		10.731.617,00		16.668.564,00		18.045.142,00		15.972.813,00	
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	0	1	15.749.561,00	1	10.731.617,00	1	16.668.564,00	1	18.045.142,00	1	15.972.813,00	
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				**100.914.811.554,08**		**76.552.138.261,00**		**123.864.090.273,07**		**139.442.783.477,59**		**128.689.953.859,21**	
Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	**Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)**	**36**	**40,67**	**100.914.811.554,08**	**42,61**	**76.552.138.261,00**	**44,55**	**123.864.090.273,07**	**46,49**	**139.442.783.477,59**	**48,42**	**128.689.953.859,21**	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				**98.034.717.950,08**		**74.328.936.316,00**		**120.019.916.573,07**		**134.889.022.850,59**		**124.219.463.208,21**	
Meningkatnya Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	**Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)**	**3**	**20**	**98.034.717.950,08**	**20**	**74.328.936.316,00**	**20**	**120.019.916.573,07**	**20**	**134.889.022.850,59**	**20**	**124.219.463.208,21**	
	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)												
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	**37,31**	**20**		**20**		**20**		**20**		**20**		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	**78,05**	**20**		**5**		**5**		**5**		**5**		
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	**0**	**0**		**15**		**15**		**15**		**15**		
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	**2,41**	**3**		**3**		**3**		**3**		**3**		
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	**1.031,39**	**1.031,39**		**1.031,39**		**1.031,39**		**1.031,39**		**1.031,39**		
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	**37**	**7**		**7**		**7**		**7**		**7**		
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				2.860.550.349,00		1.626.002.782,00		2.525.540.197,00		2.734.112.592,00		2.420.123.314,00	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	37	7	2.860.550.349,00	7	1.626.002.782,00	7	2.525.540.197,00	7	2.734.112.592,00	7	2.420.123.314,00	
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				775.499.921,00		528.974.446,00		821.613.739,00		889.466.924,00		787.319.310,00	
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.031,39	1.031,39	775.499.921,00	1.031,39	528.974.446,00	1.031,39	821.613.739,00	1.031,39	889.466.924,00	1.031,39	787.319.310,00	
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				0,00		1.955.578.649,00		3.098.192.937,00		3.421.139.168,00		3.088.815.823,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	0	0	0,00	15	1.955.578.649,00	15	3.098.192.937,00	15	3.421.139.168,00	15	3.088.815.823,00	
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				8.778.355.645,00		8.102.913.324,00		12.585.607.804,00		13.624.993.504,00		12.060.280.375,00	
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	2,41	3	8.778.355.645,00	3	8.102.913.324,00	3	12.585.607.804,00	3	13.624.993.504,00	3	12.060.280.375,00	
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				1.237.288.191,08		1.955.578.652,00		3.098.192.939,07		3.421.139.170,59		3.088.815.824,21	
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	78,05	20	1.237.288.191,08	5	1.955.578.652,00	5	3.098.192.939,07	5	3.421.139.170,59	5	3.088.815.824,21	
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				963.719.413,00		624.619.538,00		1.123.127.930,00		1.155.322.844,00		1.183.873.019,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	3	20	963.719.413,00	20	624.619.538,00	20	1.123.127.930,00	20	1.155.322.844,00	20	1.183.873.019,00	
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				77.240.632.007,00		55.320.749.062,00		90.221.564.084,00		102.556.162.235,00		95.317.394.015,00	
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	37,31	20	77.240.632.007,00	20	55.320.749.062,00	20	90.221.564.084,00	20	102.556.162.235,00	20	95.317.394.015,00	
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				476.758.391,00		325.200.556,00		505.108.039,00		546.822.518,00		484.024.663,00	
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1	1	476.758.391,00	1	325.200.556,00	1	505.108.039,00	1	546.822.518,00	1	484.024.663,00	
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				5.701.914.033,00		3.889.319.307,00		6.040.968.904,00		6.539.863.895,00		5.788.816.865,00	
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)			5.701.914.033,00		3.889.319.307,00		6.040.968.904,00		6.539.863.895,00		5.788.816.865,00	
Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	**Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)**	**36**	**40,67**	**100.914.811.554,08**	**42,61**	**76.552.138.261,00**	**44,55**	**123.864.090.273,07**	**46,49**	**139.442.783.477,59**	**48,42**	**128.689.953.859,21**	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				**735.888.749,00**		**513.816.880,00**		**800.596.242,00**		**910.459.493,00**		**805.901.064,00**	
Meningkatnya Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	**Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)**	**20,15**	**15**	**735.888.749,00**	**15**	**513.816.880,00**	**15**	**800.596.242,00**	**15**	**910.459.493,00**	**15**	**805.901.064,00**	
	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	**0**	**1**		**0**		**0**		**0**		**0**		
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	**2,62**	**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				36.365.624,00		26.016.045,00		42.934.183,00		49.214.027,00		43.562.220,00	
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	2,62	5	36.365.624,00	5	26.016.045,00	5	42.934.183,00	5	49.214.027,00	5	43.562.220,00	
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				699.523.125,00		487.800.835,00		757.662.059,00		861.245.466,00		762.338.844,00	
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	20,15	15	699.523.125,00	15	487.800.835,00	15	757.662.059,00	15	861.245.466,00	15	762.338.844,00	
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	0	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	**Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)**	**36**	**40,67**	**100.914.811.554,08**	**42,61**	**76.552.138.261,00**	**44,55**	**123.864.090.273,07**	**46,49**	**139.442.783.477,59**	**48,42**	**128.689.953.859,21**	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				**618.294.358,00**		**657.361.267,00**		**1.359.042.148,00**		**1.764.965.786,00**		**1.832.556.239,00**	
Meningkatnya Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	**Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)**	**1**	**20**	**618.294.358,00**	**30**	**657.361.267,00**	**35**	**1.359.042.148,00**	**40**	**1.764.965.786,00**	**40**	**1.832.556.239,00**	
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	**13,95**	**15**		**25**		**30**		**35**		**40**		
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	**3,80**	**10**		**15**		**20**		**25**		**30**		
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				121.178.306,00		136.383.477,00		295.283.139,00		399.586.468,00		424.436.885,00	
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	3,80	10	121.178.306,00	15	136.383.477,00	20	295.283.139,00	25	399.586.468,00	30	424.436.885,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				472.159.108,00		492.889.307,00		1.010.546.562,00		1.299.542.735,00		1.349.843.535,00	
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	13,95	15	472.159.108,00	25	492.889.307,00	30	1.010.546.562,00	35	1.299.542.735,00	40	1.349.843.535,00	
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				24.956.944,00		28.088.483,00		53.212.447,00		65.836.583,00		58.275.819,00	
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	1	20	24.956.944,00	30	28.088.483,00	35	53.212.447,00	40	65.836.583,00	40	58.275.819,00	
Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	**Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)**	**36**	**40,67**	**100.914.811.554,08**	**42,61**	**76.552.138.261,00**	**44,55**	**123.864.090.273,07**	**46,49**	**139.442.783.477,59**	**48,42**	**128.689.953.859,21**	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				**867.729.520,00**		**601.621.029,00**		**984.960.677,00**		**1.120.986.162,00**		**1.161.659.191,00**	
Meningkatnya Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	**Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)**	**9,93**	**10**	**867.729.520,00**	**35**	**601.621.029,00**	**15**	**984.960.677,00**	**15**	**1.120.986.162,00**	**50**	**1.161.659.191,00**	
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	**26,9**	**25**		**25**		**0**		**0**		**30**		
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				113.281.956,00		81.300.139,00		151.532.412,00		191.387.881,00		193.609.865,00	
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	9,93	10	113.281.956,00	35	81.300.139,00	15	151.532.412,00	15	191.387.881,00	50	193.609.865,00	
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				754.447.564,00		520.320.890,00		833.428.265,00		929.598.281,00		968.049.326,00	
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	26,9	25	754.447.564,00	25	520.320.890,00	0	833.428.265,00	0	929.598.281,00	30	968.049.326,00	
Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	**Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)**	**36**	**40,67**	**100.914.811.554,08**	**42,61**	**76.552.138.261,00**	**44,55**	**123.864.090.273,07**	**46,49**	**139.442.783.477,59**	**48,42**	**128.689.953.859,21**	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				**658.180.977,00**		**450.402.769,00**		**699.574.633,00**		**757.349.186,00**		**670.374.157,00**	
Meningkatnya Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	**Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)**	**3,97**	**5**	**658.180.977,00**	**5**	**450.402.769,00**	**5**	**699.574.633,00**	**5**	**757.349.186,00**	**5**	**670.374.157,00**	
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	**10,8**	**15**		**15**		**15**		**15**		**15**		
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				49.381.805,00		34.146.058,00		53.036.344,00		57.416.364,00		50.822.590,00	
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	3,97	5	49.381.805,00	5	34.146.058,00	5	53.036.344,00	5	57.416.364,00	5	50.822.590,00	
1.03.10.2.01.0055 - Rehabilitasi Jalan				608.799.172,00		416.256.711,00		646.538.289,00		699.932.822,00		619.551.567,00	
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	10,8	15	608.799.172,00	15	416.256.711,00	15	646.538.289,00	15	699.932.822,00	15	619.551.567,00	
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				**476.758.391,46**		**339.834.581,52**		**565.721.004,03**		**653.452.909,42**		**609.871.075,15**	
Meningkatnya kualitas tenaga TenagaTrampil Konstruksi	**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil (%)**	**44,20**	**65,12**	**476.758.391,46**	**69,47**	**339.834.581,52**	**74,55**	**565.721.004,03**	**79,62**	**653.452.909,42**	**84,69**	**609.871.075,15**	
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				**347.013.838,00**		**238.922.408,00**		**399.035.351,00**		**462.065.027,00**		**435.622.195,00**	
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	**442**	**120**	**347.013.838,00**	**120**	**238.922.408,00**	**120**	**399.035.351,00**	**120**	**462.065.027,00**	**120**	**435.622.195,00**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat	**Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)**												
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	**2**	**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		
1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				40.276.272,00		27.642.047,00		45.459.724,00		51.948.139,00		48.402.466,00	
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2	80	40.276.272,00	80	27.642.047,00	80	45.459.724,00	80	51.948.139,00	80	48.402.466,00	
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				306.737.566,00		211.280.361,00		353.575.627,00		410.116.888,00		387.219.729,00	
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	442	120	306.737.566,00	120	211.280.361,00	120	353.575.627,00	120	410.116.888,00	120	387.219.729,00	
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				**71.368.824,00**		**48.780.083,00**		**80.817.286,00**		**92.959.828,00**		**82.284.193,00**	
Terlaksananya kegiatan bidang Jasa Konstruksi	**Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)**	**17**	**1**	**71.368.824,00**	**1**	**48.780.083,00**	**1**	**80.817.286,00**	**1**	**92.959.828,00**	**1**	**82.284.193,00**	
1.03.11.2.02.0012 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				71.368.824,00		48.780.083,00		80.817.286,00		92.959.828,00		82.284.193,00	
Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	17	1	71.368.824,00	1	48.780.083,00	1	80.817.286,00	1	92.959.828,00	1	82.284.193,00	
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				**58.375.729,46**		**52.132.090,52**		**85.868.367,03**		**98.428.054,42**		**91.964.687,15**	
Terlaksananya pengawasan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang dilakukan	**Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)**	**25**	**60**	**58.375.729,46**	**60**	**52.132.090,52**	**60**	**85.868.367,03**	**60**	**98.428.054,42**	**60**	**91.964.687,15**	
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	**0**	**60**		**60**		**60**		**60**		**60**		
1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi				23.385.477,46		24.490.043,52		40.408.643,03		46.479.915,42		43.562.221,15	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota													
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	25	60	23.385.477,46	60	24.490.043,52	60	40.408.643,03	60	46.479.915,42	60	43.562.221,15	
1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				34.990.252,00		27.642.047,00		45.459.724,00		51.948.139,00		48.402.466,00	
Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	0	60	34.990.252,00	60	27.642.047,00	60	45.459.724,00	60	51.948.139,00	60	48.402.466,00	
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				**1.168.058.059,08**		**959.341.641,62**		**2.323.496.980,85**		**2.870.818.221,32**		**2.783.141.811,21**	
Meningkatnya kualitas Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	**Skoring Kinerja penyelenggaraan penataan ruang (Skor)**	**55,81**	**65,12**	**1.168.058.059,08**	**70,19**	**959.341.641,62**	**75,26**	**2.323.496.980,85**	**80,34**	**2.870.818.221,32**	**85,41**	**2.783.141.811,21**	
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				**333.730.874,00**		**276.420.472,00**		**808.172.864,00**		**1.120.986.164,00**		**1.137.457.958,00**	
Terlaksananya Kegiatan Pendampangan Revisi RTRW dan RRTR Kabupaten	**Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)**	**0**	**1**	**333.730.874,00**	**1**	**276.420.472,00**	**1**	**808.172.864,00**	**1**	**1.120.986.164,00**	**1**	**1.137.457.958,00**	
	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	**0**	**0**		**0**		**4**		**4**		**4**		
	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	**0**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		
	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	**0**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	**2**	**0**		**0**		**1**		**1**		**1**		
	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	**0**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		
	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	**0**	**0**		**0**		**1**		**1**		**1**		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				0,00		0,00		101.021.608,00		136.705.630,00		145.207.399,00	
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	0	0,00	0	0,00	1	101.021.608,00	1	136.705.630,00	1	145.207.399,00	
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota				71.513.759,00		48.780.083,00		101.021.608,00		164.046.756,00		169.408.632,00	
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	71.513.759,00	2	48.780.083,00	2	101.021.608,00	2	164.046.756,00	2	169.408.632,00	
1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang				0,00		0,00		101.021.608,00		136.705.630,00		145.207.399,00	
Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	0	0	0,00	0	0,00	4	101.021.608,00	4	136.705.630,00	4	145.207.399,00	
1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota				0,00		0,00		126.277.010,00		164.046.756,00		169.408.632,00	
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	126.277.010,00	1	164.046.756,00	1	169.408.632,00	
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				71.513.759,00		65.040.111,00		101.021.608,00		136.705.630,00		145.207.399,00	
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	71.513.759,00	2	65.040.111,00	2	101.021.608,00	2	136.705.630,00	2	145.207.399,00	
1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				95.351.678,00		81.300.139,00		151.532.412,00		191.387.881,00		193.609.865,00	
Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	95.351.678,00	1	81.300.139,00	1	151.532.412,00	1	191.387.881,00	1	193.609.865,00	
1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				95.351.678,00		81.300.139,00		126.277.010,00		191.387.881,00		169.408.632,00	
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	0	1	95.351.678,00	1	81.300.139,00	1	126.277.010,00	1	191.387.881,00	1	169.408.632,00	
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				**357.568.794,00**		**276.420.472,00**		**479.852.638,00**		**546.822.519,00**		**484.024.663,00**	
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)**	**0**	**1**	**357.568.794,00**	**1**	**276.420.472,00**	**1**	**479.852.638,00**	**1**	**546.822.519,00**	**1**	**484.024.663,00**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	**0**	**5**		**7**		**10**		**10**		**10**		
	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	**5**	**2**		**2**		**2**		**2**		**2**		
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				238.379.196,00		162.600.278,00		252.554.020,00		273.411.259,00		242.012.331,00	
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	2	238.379.196,00	2	162.600.278,00	2	252.554.020,00	2	273.411.259,00	2	242.012.331,00	
1.03.12.2.02.0006 - Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang				71.513.759,00		65.040.111,00		126.277.010,00		136.705.630,00		121.006.166,00	
Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	0	5	71.513.759,00	7	65.040.111,00	10	126.277.010,00	10	136.705.630,00	10	121.006.166,00	
1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				47.675.839,00		48.780.083,00		101.021.608,00		136.705.630,00		121.006.166,00	
Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	0	1	47.675.839,00	1	48.780.083,00	1	101.021.608,00	1	136.705.630,00	1	121.006.166,00	
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				**190.703.356,08**		**130.080.222,62**		**328.320.226,85**		**382.775.764,32**		**387.219.731,21**	
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)**	**0**	**0**	**190.703.356,08**	**0**	**130.080.222,62**	**1**	**328.320.226,85**	**1**	**382.775.764,32**	**1**	**387.219.731,21**	
	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	**0**	**10**		**10**		**10**		**10**		**10**		
	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	**0**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				95.351.678,08		65.040.111,62		101.021.608,85		136.705.630,32		169.408.632,21	
Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	0	10	95.351.678,08	10	65.040.111,62	10	101.021.608,85	10	136.705.630,32	10	169.408.632,21	
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				0,00		0,00		126.277.010,00		136.705.630,00		121.006.166,00	
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	126.277.010,00	1	136.705.630,00	1	121.006.166,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				95.351.678,00		65.040.111,00		101.021.608,00		109.364.504,00		96.804.933,00	
Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	0	1	95.351.678,00	1	65.040.111,00	1	101.021.608,00	1	109.364.504,00	1	96.804.933,00	
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				**286.055.035,00**		**276.420.475,00**		**707.151.252,00**		**820.233.774,00**		**774.439.459,00**	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)**	**0**	**0**	**286.055.035,00**	**0**	**276.420.475,00**	**2**	**707.151.252,00**	**2**	**820.233.774,00**	**2**	**774.439.459,00**	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	**0**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	**0**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	**0**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	**0**	**0**		**0**		**1**		**1**		**1**		
	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	**0**	**0**		**0**		**2**		**2**		**2**		
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				71.513.759,00		65.040.111,00		126.277.010,00		136.705.630,00		121.006.166,00	
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	0	1	71.513.759,00	1	65.040.111,00	1	126.277.010,00	1	136.705.630,00	1	121.006.166,00	
1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang				0,00		0,00		75.766.204,00		109.364.502,00		121.006.161,00	
Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	0	0	0,00	0	0,00	2	75.766.204,00	2	109.364.502,00	2	121.006.161,00	
1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR				47.675.839,00		81.300.142,00		126.277.008,00		136.705.626,00		121.006.168,00	
Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	0	0	47.675.839,00	0	81.300.142,00	2	126.277.008,00	2	136.705.626,00	2	121.006.168,00	
1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK				71.513.759,00		65.040.111,00		126.277.010,00		136.705.630,00		121.006.166,00	
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian	0	1	71.513.759,00	1	65.040.111,00	1	126.277.010,00	1	136.705.630,00	1	121.006.166,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)												
1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				95.351.678,00		65.040.111,00		101.021.608,00		136.705.630,00		145.207.399,00	
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	0	1	95.351.678,00	1	65.040.111,00	1	101.021.608,00	1	136.705.630,00	1	145.207.399,00	
1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan RTR				0,00		0,00		151.532.412,00		164.046.756,00		145.207.399,00	
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	151.532.412,00	1	164.046.756,00	1	145.207.399,00	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Tabel 4. 4
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Saluran Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Saluran Pembuang dalam Kondisi Baik (%)	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas Drainase yang Baik	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Cakupan Layanan Air Bersih	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya kualitas sanitasi rumah tangga	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber: Penyusun, 2025

Program, kegiatan, dan sub kegiatan dinas selain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra PD. Terdapat beberapa Program Prioritas (*priority project*) yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPD. Proyek Prioritas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan untuk mendukung **Tujuan 1, yaitu Tercapaianya infrastruktur yang merata dan berkualitas.**

4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPR 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR

Rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan indikator kinerja dari urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dinas. Kinerja dipahami sebagai capaian berupa keluaran, hasil, maupun dampak dari pelaksanaan subkegiatan, kegiatan, program, sasaran, serta pemanfaatan sumber daya pembangunan.

Indikator kinerja digunakan sebagai ukuran untuk menilai tingkat pencapaian suatu kegiatan, program, sasaran, maupun tujuan, yang dapat berupa *output* (keluaran), *outcome* (hasil), maupun *impact* (dampak). Penyajian indikator kinerja dinas terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Kedua indikator tersebut menjadi tolok ukur bagi dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pada periode 2025–2029 terdapat 2 (dua) indikator yang ditetapkan sebagai IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Infrastruktur Dasar Wilayah yang Berada dalam Kondisi Layak	%	-	46,21	47,51	48,71	50,01	51,31	
2.	Persentase Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pengembangan Wilayah yang sesuai dengan Penyelenggaran Penataan Ruang	%	42,24	45,50	52,49	59,28	65,94	72,49	

Sumber: Hasil Perhitungan, 2025

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berisi indikator penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang digunakan untuk menilai capaian program dan kegiatan. IKK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan indikator kinerja kunci pada tingkat *Outcome*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Seluruh IKK beserta target indikator untuk periode 2025–2030 menjadi bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara, yang disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4. 6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase infrastruktur dasar wilayah yang berada dalam kondisi Layak	%	-	46,21	47,51	48,71	50,01	51,31	
2	Persentase Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pengembangan Wilayah yang sesuai dengan Penyelenggaran Penataan Ruang	%	42,24	45,50	52,49	59,28	65,94	72,49	
3	Persentase Saluran Irigasi Kondisi Baik	%	30,85	34,90	37,98	40,43	43,51	46,58	
4	Persentase Saluran Pembuang Kondisi Baik	%	19,15	20,15	20,98	21,81	22,64	23,47	
5	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	41,93	42,27	42,61	42,95	43,29	43,63	
6	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan Rumah Tangga	%	25,38	26,93	28,48	30,03	31,58	33,13	
7	Persentase rumah tangga sanitasi aman	%	51,72	51,72	51,72	51,72	51,72	51,72	
8	Persentase rumah tangga sanitasi layak	%	95,71	95,74	95,77	95,80	95,83	95,86	
9	Tingkat Kemantapan Jalan	%	38,73	40,67	42,61	44,55	46,49	48,42	
10	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	%	59,32	65,12	69,47	74,55	79,62	84,69	
11	Persentase jumlah bangunan pemerintah yang terbangun	%	34,29	37,14	40,00	42,86	45,71	48,57	
12	Persentase bangunan yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF	%	32,66	36,11	38,79	40,93	42,67	44,13	
13	Skoring Kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skor	60,04	65,12	70,19	75,26	80,34	85,41	

Sumber: Hasil Perhitungan, 2025

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara untuk periode 2025–2029 merupakan pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah selama lima tahun ke depan. Renstra ini memuat arah, strategi, kebijakan, hingga program dan kegiatan yang mencerminkan tanggung jawab DPUPR dalam mengelola urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Penyusunannya dilandaskan pada tugas dan fungsi organisasi.

Keberhasilan implementasi dokumen ini sangat bergantung pada sejauh mana seluruh unsur di dalam DPUPR memahami isi Renstra, menunjukkan komitmen yang kuat, dan terlibat secara aktif. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas bidang dan keterlibatan pihak terkait agar pembangunan infrastruktur wilayah dapat berjalan merata dan adil bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Renstra ini berperan sebagai kompas strategis dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan. Di samping itu, dokumen ini juga menjadi alat untuk mengukur kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, dibutuhkan sistem perencanaan yang solid, serta pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu menjadi pedoman:

1. Setiap pegawai DPUPR wajib melaksanakan seluruh kegiatan sesuai peran masing-masing selama tahun 2025–2029, demi mendukung tercapainya target strategis yang telah ditetapkan.
2. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra menjadi rujukan utama dalam penyusunan Renja serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan perangkat daerah.

3. Pimpinan DPUPR bersama seluruh jajarannya akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Renstra berdasarkan hasil capaian dalam Renja.

Untuk mendukung pencapaian target-target tersebut, Renstra ini mendorong sinergi dengan para pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintahan maupun nonpemerintah. Kolaborasi yang baik diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Penajam Paser Utara

Muhajir, SE, S.Kom, ME, M. Ling
NIP. 198301052009041001



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA